



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RDP KOMISI IX DPR RI DENGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK
INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI 2. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
Acara	:	Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan RAPBN-P Tahun 2015 para Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 5 Februari 2015
Pukul	:	10.00 WIB – selesai
Ketua Rapat	:	H. Syamsul Bachri S., M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Muhammad Yus Iqbal, SE/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	A. Anggota Komisi IX DPR RI 43 orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI beserta jajaran; C. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI beserta jajaran;

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Ermalena, MHS (F.PPP)

F.PDIP :

6. Alex Indra Lukman
7. Ir. Ketut Sustiwawan
8. dr. Ribka Tjiptaning
9. Rieke Diah Pitaloka
10. Daniel Lumban Tobing
11. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
12. Nursuhud
13. dr. Karolin Margret Natasa

F.PG :

14. Hj. Saniatul Lativa, SE
15. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
16. H. Budi Supriyanto, SH, MH
17. dr. Charles J. Mesang
18. Aditya Anugrah Moha, S.Ked
19. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

20. Khaidir
21. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
22. drg. Putih Sari
23. Roberth Rouw.

F.PD :

24. Drs. H. Zulfikar Achmad
25. Siti Mufattahah, Psi.
26. Drs. Ayub Khan.
27. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

F.PAN :

28. Ir. H.A. Riski Sadig
29. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum
30. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

F.PKB :

31. H. Marwan Dasopang
32. H. Handayani, SKM
33. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
34. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

F.PKS :

35. Ansory Siregar, Lc
36. Drs, H. Chairul Anwar, Apt
37. Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM

F.PPP :

38. H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com
39. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.

F.P.NASDEM :

40. Irma Suryani Chaniago, SE
41. Ir. Ali Mahir, MM
42. Amelia Anggraini

F.P. HANURA :

43. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

ANGGOTA IZIN / SAKIT :

1. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM

UNDANGAN :

1. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc (Sekretaris Jenderal Kemenaker RI) beserta jajaran.
2. Firman Tambunan, SE, M.Si (Sekretaris Irjen Kemenaker RI) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10:45 WIB

KETUA RAPAT (F-PG/H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Ibu, Bapak Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati.
Pak Sekjen, Pak Dirjen Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
yang saya hormati beserta seluruh jajaran.**

Pertama-tama, tentu kita menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa melakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR RI dengan Eselon I Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri beberapa hari yang lalu yang pada pokoknya disepakati untuk melakukan pendalaman terhadap program-program yang telah disusun oleh Kementerian per unit Eselon 1 sehingga dengan demikian Anggota Komisi IX DPR RI *well inform* dengan program-program yang ditawarkan kepada Komisi untuk mendapatkan persetujuan. Jadwal telah disusun oleh Sekretariat, ada 7 Eselon 1 yang akan melakukan presentasi di depan Komisi dan pada season pagi ini kita gabung saja yaitu Sekjen, Dirjen lalu setelah Isoma nanti dilanjutkan dengan Bina Lattas, kemudian Binapenta, PHI JSK kemudian pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan terakhir Balitfo (Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi).

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Sesuai dengan hasil rapat kerja beberapa hari yang lalu, waktu itu dipimpin oleh Ibu Tjiptaning, Ibu Ribka ada salah satu poin disitu yang mengamanatkan agar Kementerian memperhatikan Program-program itu terkait dengan aspirasi daerah, karena memang ini kewajiban tugas konstitusional Anggota Dewan untuk memperjuangkan aspirasi yang ada di daerah. Oleh karena itu, Pak Sekjen nanti dan Dirjen bisa menjelaskan kepada Komisi bagaimana elaborasi kesepakatan itu telah dituangkan dalam program-program yang ada, saya kira itu pengantar dari kami, kita mulai sekarang Pukul 10.45 WIB, kita berharap dua unit eselon 1 ini bisa selesai sebelum jam 12. Saya kira demikian.

Saya persilakan kepada Pak Sekjen untuk menyampaikan penjelasan, nanti dilanjutkan dengan Pak Inspektur Jenderal. Kami persilakan.

Saya belum buka Rapat ini, RDP ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENAKER RI (ABDUL WAHAB BANGKONA, M.Sc) :

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati, saya muliakan Bapak, Ibu Pimpinan Komisi IX DPR RI,
Yang saya hormati Para Anggota Komisi IX DPR RI dan Para Pejabat Eselon di lingkungan Sekjen dan Irjen yang saya hormati.**

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, karunia kita bisa melakukan RDP dan kami dari Sekjen bisa menyampaikan beberapa hal yang dipandang perlu untuk kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota yang saya hormati dan saya muliakan.

Sepintas kami akan sampaikan anggaran kegiatan Tahun 2014, sebenarnya ini pengulangan juga di Raker karena sudah disampaikan. Yang kedua, bahwa memang di dalam materi penyampaian ini itu makro tetapi nanti di dalam hal detail kami siap menjelaskan dan juga untuk menyampaikan data-data yang lebih teknis dalam masalah. Kemudian, yang ketiga, terkait dengan pengawasan dan integrasi harmonisasi dan kerja sama di dalam pelaksanaan kegiatan dengan Bapak dan Ibu, menurut saya kita setelah pembahasan, sudah fix kegiatan-kegiatan di masing-masing unit kita lakukan *meeting* dan menyampaikan kepada Anggota Komisi kegiatan-kegiatan di masing-masing daerah yang sudah siap dilaksanakan dan disitulah kita kordinasikan implementasinya dan insyAllah kami siap untuk mengkordinasikan secara intensif dengan seluruh Anggota Dewan.

Ini agendanya, karena ada sedikit perubahan organisasi kami akan sampaikan profil sekretariat jenderal sebagai pelayan, jadi substansi yang kami bahas ini tidak terlalu banyak di Sekjen karena memang sifatnya hanya pelayan, *support* bagi seluruh unit teknis di dalam menunjang tugas-tugas dari unit teknis dan juga di dalam hal pengelolaan dan pembinaan karyawan atau pegawai dan disana ada pelayanan publik dalam konteks kehumasan dan juga ada pusat pelatihan untuk Tenaga-tenaga fungsional dan SDM internal. Yang kedua, (*suara rekaman kecil*)...dari Sekjen, kemudian rencana kerja Tahun 2015 tetapi sepintas akan disampaikan Tahun 2014.

Inilah organisasinya Bapak, Ibu yang saya hormati. Jadi, kami punya 5 (lima) biro ada perencanaan, keuangan, organisasi kepegawaian, biro hukum dan biro umum, sedangkan pusatnya ada pusat diklat, humas, administrasi kerja sama luar negeri...(*rekaman suaranya kecil*)...yang lama, sudah pindah ke Binangwas, PPTK pindah ke Barinbang. Inilah Anggaran Tahun 2014 dengan organisasi yang masih lengkap tadi dan realisasinya 90%, kenapa hanya 90% ada penghematan kemudian yang kedua, ada efisiensi cadangan belanja transito atau gaji pegawai yang tidak terealisasi jadi contoh sekarang kami ada rekrutmen pegawai kita alokasikan tetapi ada yang tidak terbayarkan karena tidak, seperti tahun lalu itu ada 35 formasi yang tidak lulus. Inilah tugas fungsi kami Bapak dan Ibu

mengkordinasikan kegiatan di Kementerian Tenaga Kerja, mengkordinasikan susunan rencana dan program di seluruh Indonesia, kemudian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga kepada seluruh unit teknis, kemudian pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana kordinasi penyusunan dan peraturan perundang-undangan.

Bapak, Ibu yang saya hormati, saya melihat untuk perundang-undangan ini ada yang *pitch plan*, ada yang tidak, jadi kalau di dalam perjalanannya tiba-tiba dituntut adanya satu peraturan Menteri umpamanya atau kerja sama dengan Kementerian lain, contoh sekarang di bidang kelautan perikanan, tentu akan lahir berbagai regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan ketenagakerjaan maka kami akan harmonis kesana dalam hal dituntut adanya Peraturan Menteri memback up kita akan siapkan. Kemudian, penyelenggaraan, pengelolaan barang milik negara ini semua harta yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Inilah organisasi terbaru dimana ada biro perencanaan ini tetap, organisasi kepegawaian tetap, keuangan tetap, biro umum tetap, biro hukum tetap, biro kerja sama luar negeri tetap, biro komunikasi publik, pelayanan pengaduan ketenagakerjaan dan dibawahnya ada pusat pendidikan dan pelatihan pegawai. Yang dua sudah tidak ada yaitu pusat K3 dan pusat perencanaan tenaga kerja berpindah ke unit Barembang. Ini kita sudah sampaikan kemarin Bapak ini adalah salah satu instrumen untuk menggaet kami lebih fokus pada sembilan fokus program, ada penguatan perencanaan tenaga kerja nasional Bapak, Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, di dalam perencanaan tenaga kerja ini sebelum otonomi daerah di seluruh kabupaten kota kita siapkan satu perencanaan tenaga kerja dan tentu ini sangat tergantung kesiapan data dari seluruh sektor. Saat ini harus diakui bahwa aliran data dari kabupaten kota ke pusat ini relatif ..(*suara rekaman sangat kecil*)...nah ini kita ini untuk mengintensifkan kembali.

Percepatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui Balai-balai latihan yang kita kelola dan ini menjadi perhatian nanti di Bina Lapas ini fokusnya disana, percepatan sertifikasi profesi di BNSP kemudian perluasan kecepatan kerja fokusnya ini tentu terpadu di Kementerian lain tetapi organisasinya di Bina Penta, pengundang rasa produktif juga sama, pencipta hubungan industrial yang sehat dan produktif atau PHI, kemudian penegakan hukum ketenagakerjaan Binawas kemudian perlindungan pekerja di Bina Penta, kemudian pelayanan ketenagakerjaan ..(*suara rekaman sangat kecil*)...ini menjadi salah satu yang sangat signifikan juga di dalam konteks Kesekjenan karena kami akan menyiapkan ruang satu pintu, pelayanan satu pintu di kantor kami di lantai dasar sehingga seluruh pelayanan ada di satu ruang atau satu titik. Ini yang akan kami sampaikan pelayanan apa, bagaimana menyiapkan ruangnya.

Lanjut, kebijakan pelaksana kegiatan yaitu penguatan tata laksana pemerintah yang baik atau *good governance* melalui pembangunan dan pengembangan sistem elektronik atau e-government, jadi Bapak, Ibu, ini salah satu program prioritas kami di Sekjen agar kita bisa menerapkan e-government, dengan demikian maka insyAllah pada gilirannya nanti kita bisa secara bersama-sama memantau dan melihat *progress report* dari Kementerian ini dengan seluruh kegiatannya, tentu ini memang belum jadi tetapi kita akan mulai Tahun 2015 ini untuk mengintegrasikan juga dengan

stakeholder terkait. Kemudian, peningkatan pelayanan dukungan administrasi sarana dan prasarana serta layanan publik secara cepat, mudah, transparan, akuntabel ini juga menjadi komitmen kita dan kita sudah diasistensi KPK dan BPK di dalam setiap tahapan kegiatan, contoh sekarang sebelum perencanaan kita tetapkan, kita sudah di evaluasi oleh BPKP dan juga Irjen untuk mengawal apakah dari perencanaan ini sudah *on track* atau belum. Kemudian, ada komitmen juga untuk membenahi secara menyeluruh pengelolaan keuangan dan targetnya tentu kita harapkan WTP bisa kita wujudkan, kebetulan Kementerian Tenaga Kerja belum sempat ..(*suara rekaman sangat kecil*)...WTP.

Kemudian, mendorong percepatan, penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya muliakan, memang ada beberapa PR (pekerjaan rumah) ini, salah satu isu yang sudah *di raise* adalah penyelesaian revisi Undang-Undang No.39 dan juga kita usulkan ada revisi di Undang-Undang No.13 dan beberapa regulasi-regulasi yang terdepan terutama di dalam membenahi tata kelola penempatan tenaga kerja itu ada regulasi, Sekjen memfasilitasi substansi pembahasannya tentu dari unit teknis masing-masing, kemudian peningkatan profesionalisme SDM dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya muliakan, dengan adanya Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara dimana semua tenaga-tenaga kerja di lingkup pemerintahan harus dilatih dengan standar tertentu dan disertifikasi sehingga ini perlu ada satu mobilisasi sumber daya untuk memperkuat itu.

Lanjut, ini sudah disampaikan kemarin bahwa total anggaran kita ini dan sudah disetujui. Inilah alokasi anggaran yang akan dikelola oleh Sekretariat Jenderal, disini yang besar kelihatan itu di Biro Keuangan tetapi itu gaji dan tunjangan kinerja yang besar itu. Kemudian, di Biro Umum itu adalah seluruh pelayanan operasional listrik dan lain-lain, walaupun ada tambahan disitu adalah sekarang karena kami pisah rumah dengan transmigrasi maka kami harus menyiapkan ruang kantor untuk biro keuangan, biro perencanaan, Barembang dan juga untuk pelayanan satu atap, itu saja kegiatan fisik yang akan kami laksanakan, jadi tidak ada pembangunan baru umpamanya, hanya untuk mengakomodir konsekuensi dari perpisahan ini. Ini adalah rinciannya, jadi semua pekerjaan-pekerjaan sifatnya *administratif work*, jadi kami di Sekjen ini karena sifatnya pelayanan, banyak-banyak sifatnya administratif, laporan-laporan perencanaan dan lain-lain.

Lanjut, ini di masing-masing Biro Bapak, Ibu ini di Biro Perencanaan, disini sudah termasuk Rapat Kerja nasional beberapa kali dengan seluruh *stakeholder* kita dari Provinsi, kabupaten kota, jadi anggarannya banyak kesitu saja. Kemudian, tentu sifatnya pelaporan-pelaporan, kemudian fasilitas sifatnya paling pengadaan alat kerja laptop dan lain-lain. Kemudian, ini peningkatan pengelolaan organisasi ketatalaksanaan dan kepegawaian, ini pengelolaan kepegawaian insyAllah nanti di dalam konteks e-government kami akan banyak melakukan reform disini yang signifikan disitu saja disini, kemudian peningkatan kapasitas pegawai ada diklat-diklat tetapi nanti akan muncul di Pusdiklat, disini banyak-banyak hanya yang terkait dengan pengelolaan pengembangan pegawai. Ini di Biro Keuangan, inilah yang mengelola dokumen-dokumen keuangan

sehingga DIPA dari seluruh Provinsi ada 288 unit yang melayani revisinya dan lain-lain, pembenahannya melayani tentang harmonisasi aliran dana diantara unit-unit teknis di daerah dengan pusat, kemudian termasuk penyelesaian kerugian negara hasil temuan BPK ...(suara tidak jelas)...

Ini Biro Umum Bapak, Ibu yang saya hormati, sekarang untuk diketahui bahwa pengelolaan barang milik negara saat ini sedang kita selesaikan, insyAllah segera selesai dimana tidak ada lagi milik negara yang tidak teregistrasi di dalam sistem BUMN kita, ini insyAllah sudah hampir selesai baik barang yang bergerak maupun tidak, karena ini salah satu tantangan dari laporan kita di BPK sehingga tidak WPP karena banyaknya barang-barang kita yang tidak teregistrasi dengan baik. Kemudian, saya kira yang lain-lain ini sifatnya fasilitas. Lanjut, ini biro hukum Bapak, Ibu ini yang menarik di Biro Hukum karena kemarin itu ada realisasi yang terhambat karena salah satu undang-undang yang seharusnya dilanjutkan pembahasannya tetapi berhenti sehingga dukungan yang kita alokasikan di Biro Hukum itu tidak terealisasi itu yaitu penyelesaian undang-undang, pembahasan revisi undang-undang dan tentu ke depan insyAllah dengan dukungan dari Bapak, Ibu semua disini kita ajukan lagi beberapa undang-undang yang harus diselesaikan yaitu Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, kemudian ada ide juga revisi Undang-Undang No.13 dan tentu penyelesaian turunannya karena nanti akan ada PP dan Permen yang menjadi konsekuensinya, yang lain sifatnya sosialisasi. Ini kerja sama luar negeri Bapak, Ibu ini kita memfasilitasi internal maupun eksternal, contoh dengan *internasional labour organization* ini ada ...(tidak jelas)... *meeting* dengan ILO yang terkait dengan berbagai isu ketenagakerjaan mulai dari peningkatan kapasitas SDM maupun perlindungannya dan di semua sektor. Jadi, kalau ada Rapat-rapat disana kita mewakili pemerintah untuk membahas, ada hal-hal yang menjadi pertanyaan di ILO umpamanya harus diselesaikan, umpamanya ada sengketa perburuhan yang tidak selesai dan diangkat di tingkat internasional, kita mewakili Pemerintah dan tentu bersama *stakeholder* yang lain.

Demikian juga, di dalam konteks melakukan harmonisasi dengan konferensi internasional umpamanya konferensi-konferensi yang sudah ditetapkan dan kita mau ratifikasi ini menjadi fasilitasi juga dengan kerja sama luar negeri ini. Itulah ruang lingkup, kemudian sekarang Bapak, Ibu yang perlu saya tekankan bahwa saya tidak tahu kebijakan Pemerintah dan Dewan ke depan batasan-batasan untuk menerima bantuan, dukungan terutama pembiayaan luar negeri, selama ini kami itu sangat fokus di Dana-dana yang sifatnya hibah, tetapi sekarang ada juga penawaran dimana *soft loan* sangat *soft* bunganya kurang dari 1% umpamanya dengan rentan pembayaran 20 tahun, kemudian didalamnya *include* umpamanya 35 hibahnya dari 100 perak yang dijadikan bantuan, 35 perak itu hibahkan kemudian berarti tinggal 65 perak itu menjadi *soft loan* dengan bunga kurang dari 1%, ini saya lihat menjadi *trust* Negara-negara baru untuk menjadikan jembatan kerja sama dan itu kita alami dengan Jerman umpamanya, dia kasih hibah dan beberapa pengalaman hibah-hibah seperti utang *soft loan* sangat *soft* seperti ini beberapa tahun kemudian kadang-kadang ada penghapusan, nah ini juga tetap menjadi bahan pertimbangan Bapak dan Ibu semua dalam hal ke depan ada lagi

tawaran seperti ini karena tentu ini akan menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan dari Bapak dan Ibu semua. Hanya itu yang menjadi isu di bidang kerja sama luar negeri, tentu isu-isu yang lain adalah apabila ada sengketa yang dibawa ke Forum-forum internasional. Jadi, ada isu-isu tertentu, kadang-kadang diangkat dan itu saja yang menjadi *concern* kita di dalam apa ini.

Yang terakhir, untuk kerja sama luar negeri adalah ASEAN, di ASEAN ini ada beberapa PORA yang dikembangkan baik di bidang SDM, di bidang halal food juga sudah menjadi bahan pembahasan untuk membuat satu standar bersama, penilaian bersama agar kita satu bahasa di Negara ASEAN. Di bidang kompetensi tenaga kerja itu ada *ASEAN Mutual Recognition Arrangement* dan ini beberapa sektor sudah disetujui MRAny, disini salah satu fungsi dari biro ini, bagaimana memediasi agar terjadi saling pemahaman, saling pengakuan terhadap mobilitas tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi, nah inilah fungsi salah satu dari biro kerja sama luar negeri.

Lanjut, ini Bapak, Ibu yang sebenarnya perluasan pengembangan biro humas, jadi di bidang kehumasan ini kami akan meningkatkan beberapa kapasitas, jadi nanti akan ada disana pusat pengaduan dengan IT Based, jadi sudah mulai kita kembangkan sehingga setiap saat kalau ada pengaduan langsung di..*(tidak jelas)*...dan itu *open* bisa dibaca siapa saja, kemudian selanjutnya, tentu kita akan memperkuat jaringan media dengan berbagai sistem pengelolaan datanya tentu pelayanan mass media standar ..*(tidak jelas)*...maupun elektronik tetap kita jalankan. Ini di Pusdiklat Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu ..*(tidak jelas)*..untuk mencetak SDM yang relevan kompetensinya dengan ketenagakerjaan, disana adalah tempat pelatihan untuk mencetak pengawas ketenagakerjaan, mediator ketenagakerjaan, demikian juga dengan instruktur untuk diklat non teknis, sedangkan yang teknis banyak-banyak kita latih di DLK seperti *welding*, otomotif karena alatnya ada disana namun tetap dibawah kendali programnya dengan Pusdiklat. Kemudian, ini juga menjadi tempat diklat untuk penjenjangan internal staf apakah itu tim 43 dan selanjutnya tetapi biasanya kalau tim 2 dan 1 sudah diLAN, tetap di dalam kerja sama Pusdiklat. insyAllah ke depan kapasitas pusdiklat ini kita akan tingkatkan tentu dengan dukungan Bapak, Ibu karena permintaan untuk tenaga pengawas umpamanya ini dari daerah dengan biaya dari Pemda juga ada, ada juga *sharring budget* ini (tidak jelas) sekali PORAny, jadi inilah tugas dari pusdiklat dan insyAllah tahun depan kita akan mendapatkan instruktur cukup banyak juga dan tenaga-tenaga baru, ini menjadi tugas dari pusdiklat. Inilah sepintas apa yang kami sampaikan tentang Kesekjenan, jadi anggaran Sekretariat Jenderal ada sekitar Rp.327 miliar, didalamnya sudah ada gaji disitu, kemudian kami akan mengelola 8 (delapan) unit kerja setingkat eselon 2 dan yang dulunya pusat tetapi jadi Sekjen pindah ke Bunawas, insyAllah nanti Ibu akan melihat disana programnya, itulah semua yang bisa disampaikan dan mohon dukungan Bapak dan Ibu dan sekali lagi kami juga tentu bertanggung jawab untuk memfasilitasi unit-unit teknis dengan Komisi IX DPR RI di dalam membahas hal-hal yang terkait dengan program pembinaan masyarakat secara umum, tentu yang relevan dengan ketenagakerjaan di pusat maupun di daerah.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Sekjen.

Selanjutnya, kami persilakan Pak Inspektur Jenderal.

SEKJEN KEMENAKER RI :

Mohon ijin Pak Pimpinan.

Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan melalui Bapak Irjen, kebetulan Bapak (tidak jelas)..baru operasi penggantian ginjal dan masih dalam fase *recovery* Pak, jadi belum bisa dibebani agak besar, mohon ijin dengan segala hormat presentasi Ses Irjen.

Terima kasih.

SES INSPEKTUR JENDERAL (FIRMAN TAMBUNAN, SE, M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati dan kami muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI.

Terima kasih Pimpinan.

Atas seijin kami memaparkan tentang keinspektoratan Jenderal dan sebelum berangkat tadi pagi Inspektur Jenderal menyampaikan salam hormat Beliau kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI.

Ibu, Bapak yang kami hormati dan kami muliakan.

Kami akan memaparkan tentang Keinspektoratjenderalan dengan pokok bahasan, pertama, kami akan menguraikan tentang struktur, kemudian tugas, fungsi dan personil kemudian dilanjutkan dengan capaian kinerja 2014, kemudian program ke...(tidak jelas)...untuk Tahun 2015.

Lanjut, struktur organisasi Keinspektoratjenderalan adalah seperti ini Pak, jadi sekali lagi dipimpin oleh Inspektorat Jenderal, kami selaku sekretaris Irjen dan Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati kami juga dibantu oleh dua orang pejabat eselon 2 Inspektor Wilayah 2 dan Inspektor Wilayah 4 dan Inspektorat yang lain melakukan tugas di kantor Pak ada kegiatan dengan BPK, sekaligus dibawah ini ada kelompok jabatan fungsional auditor dan kami juga dibantu oleh Kabag-kabag yang ada di belakang kami.

Pimpinan dan hadirin dan Anggota Komisi IX DPR RI yang kami muliakan.

Sebagaimana tugas kami adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, ada fungsi perumusan, fungsi pelaksana pengawasan kemudian diikuti dengan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal dan satu hal lagi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ibu, Bapak yang kami hormati dan kami muliakan.

Terkait dengan pengawasan, kegiatan yang kami lakukan adalah sebagai berikut ; di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tahun kemarin dan ke depannya juga kami melakukan audit kinerja sebagaimana kita ketahui adalah audit untuk mengukur efisien efektifitas dan disana juga terkait fungsi pembinaan dan pencegahan sebagaimana tadi yang arahan Pimpinan mau rapat ini kami juga sudah melakukan audit ini terhadap kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan hasilnya cukup baik seperti program-program di Bina Pentaan, padat karya dan program bina latasan dan program di pengawasan kemudian ada diikuti dengan audit dengan tujuan tertentu, ini biasanya sifatnya investigasi, kemudian laporan keuangan terima kasih Pak Sekjen tadi sebagaimana penjelasan Pak Sekjen ini Pak kami juga sebelum dilakukan pembahasan, terlebih dahulu dilakukan review laporan keuangan sebelum dilakukan oleh BPK terkait dengan opini, kemudian ada review RHL ini juga kami masuk disana Pak yang sifatnya preventif pencegahan terhadap usulan-usulan DIPA dan ..(*suara rekaman kecil dan tidak jelas*)..

Kemudian, ada melakukan evaluasi laporan kinerja ini yang kaitannya dengan evaluasi program secara keseluruhan, yang kami berkoordinasi dengan Menpan. Kami melakukan monitoring tindak lanjut pemeriksaan kemudian diikuti inspeksi Pimpinan dan supervisi yang dilakukan oleh para Inspektur wilayah dan satu hal lagi Pak penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal sebagai pendorong dan pelaku *quality insurance* penanggung jawab terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ini di lingkungan Kementerian dan satu lagi aksi maaf Pak sebenarnya ini aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ibu, Bapak yang kami hormati dan kami muliakan.

Terkait dengan jumlah personil di lingkungan Inspektorat Jenderal jumlah personilnya ada 180 orang yang kami perinci berdasarkan pendidikan sebagai berikut, kemudian berdasarkan golongan adalah seperti ini, lanjut. Kemudian, berdasarkan fungsional auditor jumlah auditor yang ada saat ini sebanyak 84, program ..(*suara rekaman kecil dan tidak jelas*).. ada struktural, pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional kepegawaian dan pejabat fungsional umum.

Perkenankan kami selanjutnya menguraikan tentang capaian kinerja Tahun 2014, program kami Ibu dan Bapak adalah pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenakertrans 2014, sasarannya adalah tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat dan anggaran yang kami kelola di Tahun 2014 adalah Rp.42.922.400.000 (*Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*),

untuk mengawasi program, kegiatan dan anggaran Kemenakertrans sebesar Rp.4.520.000.000,- (*Empat Triliun Lima Ratus Dua Puluh Milliar Rupiah*). Jadi anggaran kami untuk melakukan pengawasan adalah kurang lebih 0,95% ini sudah termasuk gaji Bapak dan Ibu sekalian dan kami sampaikan Pak, menyangkut kinerja anggaran dan realisasi sudah mencapai waktu Tahun 2014 mencapai 95,92% anggaran ini terbagi dua ada yang operasional untuk pengawasan Rp.16 miliar tetapi ada untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Rp.24 miliar ini termasuk gaji pegawai dan tunjangan yang dikelola di Sekretariat, yang Rp.16 miliar ini adalah untuk kebutuhan pengawasan masing-masing Inspektorat wilayah.

Ibu, Bapak yang kami hormati.

Sebagaimana tadi penjelasan Pak Sekjen, opini BPK hingga saat ini masih wajar dengan pengecualian kemudian reformasi birokrasi di Kementerian Tenaga Kerja belum optimal dan lambatnya penyelesaian tindak lanjut akhir pemeriksaan dan temuan kerugian negara, inilah yang kami hadapi dari Inspektorat Jenderal saat ini, sebagaimana kita ketahui pemberian opini ini terkait dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 yaitu wewenang BPK di dalam memberikan opini terkait dengan laporan keuangan, kemudian reformasi birokrasi juga belum optimal maaf Ibu dan Bapak sekalian, ketidakWTTan ini disebabkan beberapa hal itu terkait dengan lemahnya sisi pengendalian intern masih kami akui yaitu terkait dengan laporan keuangan menyangkut neraca dan penatausahaan BNN dan terkait juga disamping lemahnya sistem pengendalian intern terkait juga dengan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Terkait dengan permasalahan reformasi birokrasi ini beberapa *item* belum sepenuhnya akan dilaksanakan yaitu terkait dengan akuntabilitas organisasi yaitu seperti keterbukaan dalam penentuan pejabat dan satu hal lagi terkait dengan pelayanan publik. Kemudian, lambatnya penyelesaian tindak lanjut agen pemeriksaan dan temuan negara, inilah yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, yang harus kami selesaikan Tahun 2015.

Selanjutnya, kami akan menyampaikan program sasaran Tahun 2015 Ibu, Bapak sekalian yang kami muliakan, programnya tepat, sasarannya juga tepat, total anggaran mengalami kenaikan menjadi 1,30% untuk mengawasi Rp.4.273 triliun atau 7 (tujuh) program dengan 53 kegiatan, sebagaimana kita ketahui di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja itu nanti ada 7 (tujuh) program, ada program di bina penta, ada program di latas, ada program di PHI, ada program di pengawasan dan di Barembang termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kesekjenan ini akan kami awasi untuk Tahun 2015 dan kenaikan kurang lebih Rp.12 miliar ini Ibu dan Bapak adalah untuk kenaikan gaji 6% dan untuk uang makan juga mengalami kenaikan, rincian kegiatan Tahun 2015 adalah seperti ini, pengawasan sama dengan Tahun 2014 Pak, kegiatannya juga tidak banyak berubah, kemudian rincian per kegiatan bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya, ijin kami menyampaikan kebijakan pengawasan untuk Tahun 2015 sebagaimana target dan arahan Pak Menteri kepada kami Inspektorat Jenderal, peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi

WTT, kemudian pengawasan diarahkan pada kinerja 7 (tujuh) program dalam rangka mewujudkan tata kelola yang bersih dan memiliki kinerja yang baik sebagaimana tadi sinergi dengan program Kesekjenan, kemudian penetapan pengawasan dianggarkan pada analisis audit yaitu program memiliki resiko tinggi untuk skala besar dan rawan KKN kemudian kami akan mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik sebagaimana tadi kami uraikan di depan ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses perjalanan. Kemudian, mendorong pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi kami informasikan juga melalui paparan ini Ibu, Bapak Pimpinan dan Anggota baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan sudah menandatangani terkait dengan pengendalian gratifikasi yang disaksikan oleh Ibu Pimpinan dari KPK dan selanjutnya ini akan kami sosialisasikan di seluruh unit kerja termasuk salah satu tugas pokok kami di dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati dan kami muliakan adalah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, hasil pemeriksaan karena salah satu dalam penentuan status opini ini adalah ketaatan unit kerja atau ketaatan Kementerian dalam melakukan percepatan, penyelesaian tindak lanjut ini.

Untuk melaksanakan kebijakan pengawasan ini kami melakukan sesuatu nantinya Pak dan ini disamping sudah berjalan juga akan dilaksanakan di Tahun 2015 ini meningkatkan kualitas hasil laporan keuangan dan sementara ini dalam tempo minggu ini kami informasikan Ibu dan Bapak sekalian kami akan bersanding dengan BPKP untuk melakukan pendampingan terhadap *review* laporan keuangan ini, kemudian mendorong kepatuhan penyampaian laporan keuangan dan mengoptimalkan sistem informasi pelaporan. Selanjutnya, menindaklanjuti rencana aksi dan mengintensifkan percepatan tindak lanjut, kemudian meningkatkan pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah kemudian kami juga akan melakukan pemetaan terhadap kegiatan strategis dan rawan KKN dan serta meningkatkan koordinasi dengan KPK dalam pengawasan pelayanan publik, kami informasikan juga Pak kami keinspektoratanjenderalan punya *action plan* dengan KPK terkait dengan pelayanan perijinan tenaga kerja asing yang setiap 6 bulan akan kami laporkan perkembangannya terkait dengan pelayanannya dan terkait dengan ketentuan perundang-undangnya.

Terakhir, ijin kami menyampaikan sebagai penutup pagu anggaran kami Tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp.55 miliar yang tadinya Rp.42 miliar dan informasi tambahan kepada Bapak, Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan bahwasannya APBNP Tahun 2014 dan 2015 keinspektoratanjenderalan tidak ada dan terakhir mohon masukan dan dukungan Komisi IX DPR RI.

Ibu, Bapak Pimpinan yang kami hormati dan segenap seluruh Anggota Dewan yang kami muliakan.

Demikian paparan kami terkait dengan tugas dan fungsi keinspektoratanjenderalan sebagaimana yang kami sampaikan tadi.

Sekian dan terima kasih.

Terima kasih Pak Sekjen yang telah memberikan kesempatan kepada kami.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Inspektorat Jenderal dalam mewakili Pak Irjen dalam RDP pagi hari ini.

Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati.

Dua unit eselon 1 telah menyampaikan penjelasan tentang program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, seperti yang dilaporkan oleh Pak Menteri kemarin bahwa Sekjen dalam APBNP ini tidak mengalami perubahan, tetap Rp.327 miliar kemudian Inspektorat Jenderal juga tidak mengalami perubahan tetap Rp.55 miliar meskipun naik dibanding dengan Tahun 2014. Oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian, Pak Sekjen dan Pak Irjen sudah menjelaskan dengan anggaran yang sedemikian itu telah dijelaskan langkah-langkah, program-program yang akan dijalankan, nampaknya informasi yang kami peroleh dari TA tidak terlalu banyak berubah dibanding dengan penjelasan ketika membahas APBN Tahun 2015, ada sedikit perubahan sebagai akibat adanya perubahan organisasi dan tidak berdampak kepada perubahan anggaran, saya kira itu. Kami persilakan ada 4 orang Anggota yang telah mendaftar, yang pertama, kami mulai dengan yang terhormat Bapak Handayani, kami persilakan.

F-PKB (H. HANDAYANI, SKM) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Rekan-rekan Anggota Komisi IX DPR RI, Saudara Sekjen beserta jajarannya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah masalah penilaian WTP dan WTT, ini mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja belum pernah dapat Pak ya, WTP belum pernah dapat, mungkin bisa disampaikan nanti apa masalah-masalahnya, selama ini ada Menteri Ketenagakerjaan tetapi untuk penilaian ini sangat tidak memuaskan, dimana yang disampaikan tadi adalah masalahnya menindaklanjuti temuan, Bapak sebagai Sekjennya, Irijennya menindaklanjuti berarti tidak diikuti dengan aturan yang ada, kami di Jambi Pak selama ini belum dapat WTP tetapi dalam waktu 2 tahun berturut-turut dapat WTP, kenapa? Kita dari DPR RI memperbaiki mana kurang-kurangnya tetapi nanti permasalahan itu mungkin bisa ditindaklanjuti, mungkin melalui Pimpinan nanti bisa apa permasalahan temuan dari BPK itu nanti bisa diselesaikan Pak, ini masalah keuangan negara, kenapa terabaikan, apalagi ada

temuan, Bapak sendiri menyampaikan temuan tidak ditindaklanjuti, ini Bapak sudah tahu ada temuan tetapi tidak ditindaklanjuti, apa penyebabnya maka tidak menindaklanjuti pertemuan tersebut.

Untuk Irjen, selama pemerintahan Bapak ini berapa banyak uang negara yang bisa diselamatkan, ada tidak, biasanya kalau temuan KPK ini ada sekian uang, sekian dana itu bisa diselamatkan oleh negara, ada petugas selama ini untuk penyetor ke negara.

Yang selanjutnya, masalah anggaran di Sekjen, Sekjen ini ada penurunan anggaran, pada Tahun 2014 itu ada 452 dan Tahun 2015 ini 327, anggaran di Kementerian naik kok di Sekjennya turun, kira-kira penyebabnya apa kira-kira itu. Yang menjadi suatu pemikiran saya adalah masalah pusat diklat kepegawaian, berbeda sekali, jauh sekali bedanya dari Tahun 2014 itu bisa sampai 60 miliar tetapi pada tahun ini sangat penting sekali untuk SDM, pegawai kita.

Mungkin itu saja intinya, terima kasih.

Yang jelas untuk dua biro ini tidak ada yang untuk masyarakat ya, minim sekali untuk masyarakat, ini untuk kelola administrasi dari perkantoran itu sendiri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Handayani.

Selanjutnya yang terhormat Al Mukarom M. Ali Taher Parasong.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M. Hum) :

Bissmillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Saudara Anggota, kemudian Saudara Sekjen dan Irjen.

Nama saya Muhammad Ali Taher Parasong Dapil 3 Banten No.A-495. Saya hampir kehilangan pertanyaan, karena dari uraian ini hampir semuanya normatif, sangat normatif dan standar ya, jadi saya nilai cukup bagus, cukup informatif. Tetapi karena terakhir Saudaraku Sekjen itu penutup ada poin 5 mohon dukungan dan persetujuan Komisi IX DPR RI kami sebagai Anggota tentu saja memberikan dukungan tetapi dukungan itu sebagai orang sekolahan bersama-sama dengan Saudara maka ada tiga alasan. Pertama, dukungan itu harus rasional, kedua, dukungan itu harus obyektif dan ketiga, dukungan itu proposional, dari ketiga aspek itu maka hasil akhir dari rasional, obyektif, proposional itu fokusnya kepada apa, fokusnya kepada penataan sistem birokrasi yang handal dan baik, jadi Kesekjenan itu melakukan upaya kordinasi untuk bagaimana supaya elanvital dari Kementerian itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya terutama fungsi kordinasi vertikal maupun horisontal. Kedua, di dalam angka-angka anggaran ini sekali lagi memang ada volume kenaikan karena memang

ada perubahan nomenklatur, jadi saya kira wajar saja. Kemudian, yang ketiga, saya kemarin dengan Menteri memang bersungguh-sungguh dari hati saya yang paling dalam bahwa kita ini DPR RI baru, Kementerian baru, nomenklatur baru, kita berazam, berazam itu berketetapan hati yang paling dalam bahwa mulailah tahun ini diupayakan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dulu kan WTS (Wajar Tanpa Syarat), ini tidak ada *request* memang, kalau tidak percaya tanya Pak Sekjen, tetapi perubahan itu bagus, jadi WTP, WTS bagus sekali, kalau dulu di WTS saya protes terus. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor menjadi penting untuk menaikkan WTP dulu, jangan lupa bahwa kemampuan untuk pengendalian internal, satuan pengendalian internal itu sangat-sangat penting, sebenarnya sih mudah saja karena rajin mencatat uang masuk, uang keluar, peruntukannya untuk apa, *accountabilitasnya* itu cuman kadang-kadang semangat untuk menyelesaikan tepat waktu terhadap norma, kaidah-kaidah keuangan itu yang kadang-kadang lambat Pak. Jadi, oleh karena itu Pak Sekjenlah mudah-mudahan kita berharap Pak Sekjen kan baru juga ini kan? Jadi, belum terlambat tetapi Sekjen baru, jadi ini baru Sekjen. Jadi, oleh karena itu harapan saya seperti itu.

Kemudian, yang ke empat, pernyataan reformasi birokrasi itu harus ada indikator Pak, indikator yang paling utama itu kan meningkatkan integritas pelayanan publik, kalau orang datang ke kantor itu kan senyum sapa, istilah.. (*suara rekaman kecil sekali*).. Jambi itu kebetulan isteri Bupati, penggerak PKK kepada saya mengatakan *Pak Ali, kalau mau pelayanan publik yang bagus itu kalau ..(tidak jelas)...5* saja cukup, salam, senyum, sapa, sentuh, sopan, 5S kan begitu. Kan ada orang bermasalah itu disentuh dalam perspektif membangunkan semangat begitu loh terhadap karyawan itu kalau bermasalah jangan langsung divonis Pak, tetapi dibimbing, diarahkan, dibesarkan hatinya sebab tidak ada yang tidak berdosa di muka bumi ini, Buya Hamka mengatakan kalau ada manusia yang tidak berdosa itu malaikat sudah, nah oleh karena itu kalau ada karyawan bersalah itu dibimbing, diarahkan, di motivasi agar dia kembali pada jalan yang baik menurut SOP yang itu, saya kira itu. Jadi, itu penting sekali.

Terakhir, Saudara-saudara sekalian, saya berdoa mudah-mudahan Saudaraku Irjen cepat sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah SWT supaya beliau dapat bekerja lagi dengan baik supaya *team work* di dalam pemerintahan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, ini suara hati nurani, saya bukan Hanura Pak, hati yang amanah, makanya ada Partai Amanat Nasional.

Terima kasih Pak Sekjen, Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam.

Salah satu ciri dari Al Mukarom itu selalu mendoakan orang lain, itu baik sekali.

Selanjutnya, yang terhormat Bapak Djoni Rolindrawan kami persilakan.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR,MBA) :

Baik, terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan Rekan Anggota Komisi IX DPR RI,
Bapak Sekjen, Irjen beserta seluruh jajarannya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Djoni Rolindrawan dari Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, daerah pemilihan kota Bogor dan kabupaten Cianjur.

Mohon maaf agak sektoral ini, jadi saya ingin menyuarakan tentang nasib yang berada di sektor maritim begitu ya, karena komitmen dari Bapak Presiden juga akan memperhatikan lebih ke maritim. Jadi, saya melihat disini ada tadi anggaran Sekjen untuk Biro kerja sama luar negeri begitu yaitu Rp.21 miliar dihubungkan dengan tadi apakah masih wacana akan berhubungan dengan lembaga kredit luar negeri yang ada di Jerman begitu ya, saya tahu itu ada Kementerian Kesehatan sudah mendapatkan *soft loan* dari KFW (*kreditanstalt für wiederaufbau*) kebetulan saya mengetahui lembaga kredit ini, nah tentu lembaga kredit itu juga ada harapan, ekspektasi begitu, misalnya tadi 65% juga, 35% nya *soft loan* seperti misalnya yang diberikan kepada Perusahaan-perusahaan pelayaran BUMN itu kan besar sekali, jadi sebagiannya ada hibah atau yang *soft loan* dengan harapan bahwa 30 tahun kapal itu beroperasi tentu *spare partnya* segala macam jadi juga akan kembali, jadi artinya muncul benefitnya ada disitu begitu. Nah, yang saya sampaikan itu kenapa ingin menyuarakan dari, saya mantan Nahkoda Pak tetapi Tahun 1986 sudah selesai begitu, hanya ada titipan-titipan dari Rekan-rekan itu bahwa kita ini negara maritim, ada berapa banyak kapal latih misalnya di Indonesia, jawabannya itu nol Pak, jadi kita tidak punya kapal latih hanya angkatan laut yang punya maruci sementara yang kapal-kapal niaga itu tidak, mungkin jaman saya masih Taruna itu beruntung karena sekolahnya itu punya hubungan-hubungan dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri, jadi untuk bisa praktek kerja itu bisa di kapal-kapal asing, kapal luar negeri maupun sedikit di kapal nasional begitu.

Jadi, harapan saya itu mungkin lintas kementerian dengan perhubungan saya kira ya itu mohon dipikirkan, jadi kalau misalnya di laut itu ada Perwira, ada rating bawahan, jadi kalau perwira itu misalnya yang sekolah-sekolah negeri, itu bisa mendapatkan kapal untuk praktek kerja, sedangkan misalnya banyak juga mahasiswa Taruna yang Sekolah-sekolah pelayaran swasta itu untuk praktek susah, itu yang perwira apalagi yang bawahan, yang rating, yang klasi juru kemudi seperti itu begitu. Jadi, luar biasa itu dan anehnya lagi persyaratan berlayar salah satunya harus punya buku pelaut *siemens book* begitu ya dan untuk mendapatkan *siemens book* itu harus diminta pengalaman berlayar, semua itu hanya tipu menipu, akal-akalan mensiasati pelaut itu punya buku pelaut yang

sebenarnya berlayar begitu, jadi itu obyekan cara pungli yang resmi, tidak resmi di kisah bandaran seperti itu. Jadi, saya kira sih memang kita sebagai maritim ditanya ada kapal latih itu nol jawabannya seperti itu, itu yang sangat menyedihkan begitu. Jadi, mungkin harus antar Kementerian saya kira entah bagaimana kalau saja nanti dibuat kapal oleh katakanlah PT.PAL tetapi dengan kredit dari KFW Jerman itu, dengan *soft loan*, mungkin bisa di apa namanya bahwa memang betul arah kita menjadi negara poros maritim dunia, kita memperhatikan maritim segala macam itu memang terwujud konkrit begitu tetapi kalau misalnya katakanlah disini ada biro kerja sama luar negeri mudah-mudahan itu bisa menghasilkan yang seperti saya bilang tadi ada kapal latih, walaupun kapal latih itu kan luar biasa juga mahalnya begitu ya, karena KFW yang Jerman itu harus membangun biasanya, jadi tidak bisa membeli yang *second hand* atau apa seperti itu karena mereka juga kepikiran nantinya harus panen balik begitu jadi tidak ada makan siang yang gratis, kan seperti itu ya. Saya kira itu yang saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Djoni.

Selanjutnya, yang terhormat Ibu Okky Asokawati.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati.
Bapak Sekjen, Bapak Irjen beserta jajarannya dari Kemenaker yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Untuk Pak Sekjen, saya hendak menyoroti beberapa hal terkait dengan tenaga pengawas Pak, karena saya sangat *concern* dengan jumlah tenaga pengawas ini, menurut hemat saya banyak masalah-masalah itu timbul karena kita kekurangan tenaga pengawas dan saya kemudian melihat disini di nomenklatur 2165 penguatan kualitas SDM aparatur, apakah disitu termasuk didalamnya kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pengawas ketenagakerjaan ini dan saya ingat ketika kita Raker beberapa hari yang lalu Pak Menteri menjelaskan untuk pemenuhan tenaga pengawas ini ada dua hal yang akan dilakukan, pertama, rotasi begitu kalau tidak salah, jadi yang kerjanya kurang banyak dimaksimalkan dan satu lagi menyertakan masyarakat, yang ingin saya tanyakan terkait dengan keterlibatan masyarakat di dalam pemenuhan tenaga pengawas ini bagaimana rekrutmentnya dan kemudian mereka statusnya seperti apa, karena kan ketika kita bicara tenaga pengawas Pak Sekjen itu kan idealnya disini saya dapat informasi satu tenaga pengawas itu mengawasi 155 perusahaan, sementara apa yang saya dapati disini di Indonesia ini tenaga

pengawasnya saat ini baru 1773 orang dengan 274.791 perusahaan artinya kan memang masih sangat jauh sehingga saya inginkan Bapak bisa memberikan *road map* mengenai pemenuhan tenaga pengawas ini agar kami di Komisi IX DPR RI bisa juga mengawal bagaimana pencapaian jumlah dari tenaga pengawas ini. Juga Tahun 2017 Bapak Menteri Tenaga Kerja yang terdahulu yaitu Pak Muhaimin mengatakan bahwa Tahun 2017 akan dikirim dari Negara kita ini tenaga kerja yang hanya formal, tidak informal, berulang di periode lalu saya minta adanya *road map* bagi rencana untuk pengiriman tenaga formal di Tahun 2017 tetapi hingga saat ini rasanya saya belum pernah melihat *road map* tersebut yang dibuat oleh Kemenaker, mungkin dengan adanya Pak Sekjen yang baru disini, punya semangat baru kemudian bisa membuat *road map* bagi tercapainya rencana dari Kemenaker Tahun 2017 untuk mengirim tenaga formal.

Lalu di kode nomer 2157 masih Pak Sekjen, disitu dikatakan pembaruan masalah hukum, pembaruan artinya penyelesaian masalah itu sudah ada kemudian diperbarui, nah yang saya ingin tahu pembaruan seperti apa untuk masalah hukum yang akan dilakukan oleh Kesekjenan dari Kemenaker ini terkait dengan masalah-masalah hukum.

Untuk Pak Irjen, dari nomer kode 2167 sampai 2170 disitu ada pengawasan Inspektorat 1 sampai 4 tetapi Bapak tidak katakan *output* setiap pengawasan itu apa, itu yang ingin saya tahu *outputnya* apa dan 2171 itu yang terbesar nomenklturnya itu sebesar Rp.37 miliar dengan 7 *output* dimana dikatakan dukungan manajemen dan teknis lainnya, saya ingin tahu Pak apa itu dukungan manajemen teknis lainnya di nomenklatur 2171 karena itu yang terbesar Rp.37 miliar. Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

*Wabilahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Terima kasih.
Selanjutnya yang terhormat Ibu Rieke.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Anggota Komisi IX DPR RI,
Bapak Sekjen Kemenaker beserta jajarannya, dari Irjen Kemanaker juga beserta jajarannya.**

Saya langsung membaca ini yang dari Kesekjenan, dari halaman 16 untuk dibagian belakang sampai terakhir, saya mencoba mengelompokkan dari semua yang dipaparkan itu yang isinya laporan ada 28 kegiatan, layanan kantor ada 8, fasilitas ada 17 dan kegiatan sangat minim. Jadi, kalau dulu kita memang bisa diberikan satuan tiganya,

sekarang kita tidak diberikan satuan tiganya tetapi dengan melihat seperti ini juga tetap pertanyaan saya sama ini terlalu banyak dokumen dan laporan, saya juga minta penjelasan begitu karena tidak mungkin kita menyetujui anggaran kemudian hanya menjadi kertas apalagi sudah sistem IT, buat apa Pak, ditengah sekarang sedang berusaha memperbaiki kinerja menurut saya sudah waktunya kita meninggalkan hal-hal lama yang tidak efektif. Saya minta terutama Sekjen untuk membedah kembali ayo kira revolusi mental anggaran Kemenaker ini, tidak bisa model anggaran yang seperti ini saya kira dipertahankan, kita lihat satu per satu ya, ini semua isinya kalau pun ada layanan di setiap *slide* ini layanan perkantoran lalu untuk ke masyarakatnya mana, saya tidak melihat ada program yang misalnya tadi juga masalah hukum ya anda hanya target 30 kasus, sosialisasi peraturan perundang-undangan 450 orang, mau apa yang disosialisasikan 450 orang? Di realokasilah kayak di slide diatasnya slide 19 peningkatan pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum Rp.93 miliar itu ya Pak di slide 19 untuk penyelesaian masalah hukum, peraturan, sosialisasi dan sebagainya anda hanya mengalokasikan Rp.16 miliar dengan segala persoalan yang ada, saya mohon maaf kalau kayak begini, pola begini bukan hanya menentukan angka Pak, gampang kalau memang ini bagus, saya kira seluruh Fraksi yang ada di Komisi ini bukan hanya mendukung tetapi ikut memperjuangkan, tetapi kalau kayak begini saya mohon dukungan dari Teman-teman seluruh Fraksi kita tolak dulu, tidak bisa dengan kasus ketenagakerjaan yang bejibun, jumlah pengawas minim, kita sudah rapat 12 jam, yang kami harapkan kesimpulan rapatnya itu menjadi tolak ukur khususnya Kesekjenan untuk membuat anggaran, tetapi kalau seperti ini buat apa kemarin kita rapat 12 jam? Coba anda bayangkan orang sekarang mulai bertanya tentang BPJS Ketenagakerjaan atau tentang Undang-Undang No.13 saja itu banyak orang yang belum paham, anda hanya menganggarkan 450 orang, Pak, kalau kita mau DPR RI ini juga saya kira dengan semua Kementerian dan lembaga lain kita bekerja sama termasuk mensosialisasikan undang-undang dan segala macam, bahkan BKKBN yang anggarannya kecil dan juga BPOM juga super kecil itu misalnya sosialisasi peraturan undang-undang itu kita dilibatkan, kalau ini targetnya 450 orang dibagi berapa orang ini jumlah Anggota Komisi? 50 orang Pak, saya tidak tanya balik saja masuk akal tidak? Logis tidak? Dimana kita harus kerja keras sosialisasi misalnya berapa bulan lagi masuk BPJS Ketenagakerjaan, Menteriya sudah begitu semangat ya, saya kira kita tahu semangatnya luar biasa tetapi kalau tidak didukung dengan *back office* yang cukup kuat tidak mungkinlah tidak cukup semangat doang, ini kita bicara politik anggaran, semua semangat dan jargon kerja, kerja dan kerja itu tetap butuh duitlah, kalau kemudian alokasi uangnya lebih banyak untuk membuat dokumen dan laporan saya kok tidak yakin bahwa akan ada peningkatan kinerja yang lebih baik begitu.

Kemudian, disini seperti saya minta juga nanti dijelaskan, saya tidak tahu apakah kita punya waktu, apakah ini sudah masuk rincian per eselon 1 atau belum atau seperti dulu ya kita bisa berdebat panjang lagi, ini misalnya ada pertemuan Rapat Kerja dengan Lembaga Tinggi Negara ya, pasti DPR RI lah dan organisasi non pemerintah 154 pertemuan, kemudian publikasi humas 23 eksemplar, Pak apa yang dipublikasikan cuman 23 eksemplar? Mayoritas Anggota Komisi IX DPRRI ini saya tahu banyaknya

baru tetapi tidak gini-gini amatlah Pak, banyak juga yang lama, 23 eksemplar publikasi humas itu apa? Apa yang dipublikasikan dengan 23 eksemplar itu, apa indikator suksesnya? Saya perlu penjelasan, kemudian juga sosialisasi kehumasan 2 kegiatan, jelas kurang, lalu tadi saya lupa di bagian biro organisasi dan kepegawaian di bagian mana tadi di bagian pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum, saya tidak tahu ini uang dialokasikan untuk membeli gedung atau membangun gedung dan bangunan, ini gedung apa dan bangunan apa, kami butuh penjelasan karena di slide ini alokasi anggarannya yang paling besar ya. Kemudian, kasus hukum sudah tadi, penelaahan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan ini juga kami minta apa saja yang mau diselesaikan begitu, perundang-undangan yang dihasilkan apa saja, ini karena penting, apakah sesuai dengan hasil rapat kita permintaan kita kemarin yang karena jangan sampai kemudian Presiden minta Undang-undang Sistem Pengupahan karena itu juga menjadi kunci dan selalu bikin ribut setiap tahun tetapi kemudian Menteri sepertinya sudah setuju tetapi Dirjen terkait tidak hadir disini justru menolak, ini kan juga penting, penting masuk apakah ada juga kajian tentang aturan upah itu sendiri atau tidak, dikatakan lewat Peraturan Turunan, Peraturan Turunan Undang-Undang No.13 tahun berapa itu oh ya tahun 2003, saya hanya ngecek saja, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 satu-satunya aturan turunan yang belum diselesaikan tentang upah, padahal bikin isu setiap tahun ternyata pantas saja kisruh orang aturan turunannya belum diselesaikan, nah ini sekedar saran saja, tentu saja bukan untuk berniat apa-apa tetapi tentu saja saya berharap 5 tahun kemarin kita tahu ada hal-hal yang bisa dilanjutkan tetapi ada hal-hal yang memang harus diperbaiki dan sekali lagi meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi tidak ada katanya satuan tiga ke DPR RI tetapi anda jangan lupa Undang-Undang Dasar Pasal 23 mengatakan *bahwa hak budgeting itu tetap ada di DPR RI*, tidak menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bisa menganulir, saya minta penjelasan juga apa saja dokumen-dokumennya, kira-kira Pimpinan kalau yang tidak perlu jadi dokumen pakai IT saja kenapa sih sekarang, memang tidak punya di Kementerian, tidak perlu harus selalu, harus *paper less* lah, kenapa semuanya harus bentuk, anda bayangkan anda bikin dokumen itu untuk apa, terus ditaruh dimana itu juga akan banyak memakan biaya, itu saja yang ingin saya sampaikan.

Nah, satu lagi saya belum sempat baca tetapi kira-kira saya ingin kita sama-sama juga minta bantuan Teman-teman untuk coba dilihat begitu mana yang anggaran ini yang akan menjadi anggaran produktif atau anggaran konsumtiflah kira-kira istilahnya begitu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Cukup saya kira mewakili semua sudah, apa yang dijelaskan oleh Pak Sekjen dan juga Pak Irjen.

Kami persilakan Pak Sekjen untuk menanggapi pertanyaan dari para Anggota.

SEKJEN KEMENAKER RI :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang pertama, terkait dengan penilaian WTP memang setelah saya simak secara seksama memang kita punya beberapa apa namanya masalah di dalam pertanggungjawaban dan perlu diketahui bahwa yang bermasalah ini sejak Tahun 2006 yang menjadi target penilaian itu diatas 2007, 2008 dan 2009 itu kami dalam konteks ini adalah terutama inventarisasi, inventarisasi dari tanah, bangunan dan peralatan-peralatan yang kita hibahkan di daerah, contoh saja beberapa tanah karena ini yang penilaian WTP dan itu bersama-sama dengan transmigrasi masalah kasus pertanahan umpamanya itu masih ada yang belum selesai, kemudian juga beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan peralatan yang menjadi aset negara tetapi insyAllah saya berjanji Bapak dan Ibu semua, kami insyAllah tahun ini akan merapikan semua, itu tekad kami. Kemudian, ada juga beberapa kasus Bapak dan Ibu yang saya hormati, contoh saja di salah satu Provinsi ada penyimpangan di dalam konteks keuangan, kemudian kami telusuri perusahaannya pun sudah tidak ada kemudian orangnya kami berupaya mencari dengan berbagai sumber juga kita sudah bertemu dan minggu lalu kami mengundang pihak BPK dan seluruh *stakeholder* yang relevan dalam konteks ini dan bagaimana dengan sesuatu yang memang tidak bisa ditelusuri dan kami diberi *dateline* untuk penghapusan hal-hal seperti itu dan insyAllah segera kami selesaikan.

Kemudian, yang terkait dengan temuan-temuan terkini insyAllah sudah kita *follow up* sesuai dengan aturan-aturan terutama yang 2-3 tahun terakhir ini, itu sudah ada solusinya, kalau ada kerugian negara sudah ada umpamanya kesiapan dari pemborong untuk melunasi pengembaliannya dengan durasi waktu umpamanya 2 tahun pengembalian, itu sudah selesai, tetapi yang menjadi PR (pekerjaan rumah) yang memang tahun-tahun sebelumnya 2007, 2008 memang kami butuh waktu untuk memverifikasi, demikian juga dengan inventarisasi aset negara mohon maaf mungkin di Kementerian lain tidak terjadi tetapi di tempat kami Kementerian Tenaga Kerja jujur saja memang dokumen-dokumen aset negara ini tidak semuanya *ready* dan itu ada dibawah pengelolaan Pemda, umpamanya dulu ada Kementerian Ketenagakerjaan Bapak itu dokumen-dokumen mesin-mesin umpamanya begitu berganti organisasi sebagian perlu di verifikasi ulang, inilah yang kami temui dan insyAllah setelah sampai saat ini sudah sebagian besar insyAllah bisa kami selesaikan dan kami bertekad tahun 2015 ini insyAllah sudah *finish* semua aset-aset ini, tentu saja dengan asumsi bahwa di daerah juga ada dukungan, contoh saja di dalam penyelesaian setiap aset ini kami harus duduk dengan seluruh dinas yang terkait, jadi tidak bisa kami saja disini yang mengelola dokumen-dokumen tetapi kami harus duduk bersama memverifikasi kemudian sampai tuntas.

Terkait dengan pusdiklat sesungguhnya meningkat anggarannya Bapak dari 22 ke 28 ini pun terus terang saja Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, pengalaman tahun-tahun sebelumnya contoh pengawas, kami sudah alokasikan anggaran tetapi rekrutmen dari Pemdanya yang tidak cukup, demikian juga dengan instruktur, untuk

diketahui bahwa kami dapat kuota tahun ini 2014 instruktur untuk di Balai-balai tetapi tidak terpenuhi juga, inilah konsekuensinya karena tentu kalau kita bicara jabatan fungsional tidak semua alumni bisa mengisi fungsi-fungsi tertentu, nah untuk itu maka kami sedang melakukan satu persiapan Ibu Okky yang saya hormati, dengan adanya Undang-Undang No.5 tentang ASN maka ada koridor disitu, adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan kami sudah rapatkan ini bahwa untuk fungsional ini perlu kita siapkan rekrutmen secara khusus dengan menggunakan koridor ini, jadi sistem kontrak. Nah, apa kelebihanannya dengan sistem kontrak? Kita bisa menggaet langsung dari pusat, kalau yang PNS murni Ibu mohon maaf, kami punya pengalaman melatih fungsional, sudah selesai melatih kembali ke daerah dipindahkan oleh Bupati, kebetulan sampai saat ini belum ada regulasi yang tetap, yang bisa membatasi perpindahan tenaga fungsional dari sektor A ke sektor B dan kami sudah menyampaikan secara tertulis kepada Menpan kiranya ini harus ada minimum PP karena ini yang menyebabkan kekurangan tenaga fungsional yang paling signifikan.

Kemudian, tentu saja kami akan perhatikan Ibu insyAllah ini kami persiapkan karena PP turunan undang-undang No.5 tentang ini juklak, juknisnya belum selesai tetapi ini kami jadikan prioritas untuk merekrut penambahan tenaga-tenaga fungsional bukan hanya pengawas Ibu tetapi juga instruktur-instruktur dan tenaga pengantar kerja dan lain-lain.

Kemudian yang selanjutnya, terima kasih Pak Taher, insyAllah kami akan memaksimalkan kerja sama lintas sektor ini untuk tujuan optimalisasi fungsi kami Pak, demikian juga dengan pembinaan staf dan insyAllah tekad kami Pak, terima kasih atas dukungannya WTP menjadi prioritas kami untuk ini dan kami ingin WTP ini yang fundamental memang WTP, jadi secara sistematis jadi siapa pun pengelolanya insyAllah sudah jalan.

Kemudian, dari Pak Djoni, mohon ijin Pak untuk bidang maritim kebetulan kami memang sudah rapat dengan *stakeholder* 2 minggu lalu untuk membahas khusus untuk maritim karena maritim ini ada dua kanvas yaitu tenaga kerja yang berlayar di kapal niaga yang diatur oleh *regulasi ..(tidak jelas)... international maritime organization* kemudian yang non SCTW kebetulan ini yang belum diatur dan ini yang paling banyak kasusnya yaitu di perikanan baik yang berlayar di wilayah Republik Indonesia maupun yang diluar, nah ini kami sudah berkordinasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan kemudian dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengangkat ini sebagai satu prioritas penyiapan regulasinya Pak dan memang belum ada regulasi yang melindungi pelaut kita yang ada di kapal-kapal ikan dan kebetulan *international maritime organization* ini tidak mempunyai regulasi untuk perlindungan untuk itu, hanya yang ada di kapal niaga, nah untuk itu maka kami sudah bertemu dengan KPI (kumpulan pelaut Indonesia) dan kita bersama-sama untuk paling tidak Permen dulu kita siapkan dan itu sudah tekad kami Pak dan paling tidak ada satu upaya-upaya regulasi untuk Kapal-kapal ikan ini, ada pun yang terkait dengan pendidikannya tentu ada di perhubungan laut Pak, termasuk penyiapan instalasi pendidikan dan lain-lain kami kebetulan terutama yang dibawah koridor ECTW atau yang dibawah *international maritime organization* memang *stakeholdernya* disana dan kami masuk di area-area yang diluar itu Pak, contoh untuk tikar, elektronik, tukang kayu dan lain-lain kami lakukan itu Pak, jadi kami melayani anggota-anggota KPI yang mau

meningkatkan keterampilannya dan bahkan kami melayani yang namanya group kapal Antony Feeder dari Belanda itu untuk teknisnya tetapi yang tidak non ECTW Pak dan itu dilakukan *feeter* elektronik listrik itu bisa di DLK-DLK Pak tidak ada masalah. Namun, sekali lagi tentu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan memang ini kami perlukan ya karena kapasitas yang ada disini, yang ada di tempat kami harus sinergi, insyAllah ini kita akan tindak lanjuti, selama ini juga di dalam pengisian tenaga kapal pesiar Pak ada beberapa kerja sama dan sekarang di Lombok Timur kita rintis untuk mengisi juga Kapal-kapal pesiar dengan menggunakan DLK untuk *skill* yang relevan dengan kita, sedangkan yang untuk katakanlah yang *basic trend* dan sampai mualim itu urusannya Kementerian Perhubungan Pak kami minta masuk disitu.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR,MBA) :

Pimpinan, tetapi yang di kapal pesiar ini tetap harus ikut *estisida beliu* jadi tetap saja seperti itu.

SEKJEN KEMENAKER RI :

Jadi, polanya seperti ini Pak, kami pernah mengisi sekitar 300 orang untuk mengisi kapal pesiar untuk kemudian hal-hal yang memang tidak ECTW kami urusi tetapi begitu masuk ke katakanlah *basic safety training* sampai hal-hal yang terkait dengan ECTW itu kami kerja sama dengan perhubungan laut, jadi kami membagi tugas disitu karena memang kapasitas kami tidak siap untuk itu seperti yang Bapak sampaikan tadi mualim sampai yang terendah.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR,MBA) :

Pimpinan, jadi yang permasalahan saya tadi angkat itu walaupun jabatan apa pun selain perwira ke atas itu tetap mereka itu butuh pelaut yang sekarang itu hanya akal-akalan, ya harus punya buku pelaut dengan pengalaman padahal itu tidak boleh, jadi itu telur sama ayam padahal itu dimanfaatkan oleh para penerbit buku itu untuk mencari uang, jadi mungkin kalau saja ada kapal latihan, jadi yang tetap itu kan harus ada pengalaman berlayar sebagai yang dilatih begitu ya, jadi memang harus ada kapal latihan begitu baru ketentuan itu bisa dipenuhi, tanpa ada kapal latihan berapa puluh ribu atau 100 ribu pelaut kita itu dokumennya akal-akalan begitu, itu maksud saya, jadi harus ada kapal latihan.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENAKER RI :

Oke Bapak, insyAllah dengan sangat senang hati Pak karena kami akan merumuskan satu Permen di dalam Undang-Undang No.13 kan ada *lex specialis* untuk pengaturan khusus mengenai pengawasan kapal, nah mungkin kita bisa disitu bersama-sama dengan perhubungan mengatur itu Pak, memang Permennya sudah kita siapkan, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dan untuk kita dengan senang hati menjadi *...(tidak*

jelas)...karena Bapak memang Alumni disitu ya Pak, insyAllah. Ini kami sudah mempersiapkan itu Pak Permennya, itu untuk pengawasan.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :

Ketua, interupsi sebentar.

Sedikit Pak Sekjen sebelum lupa.

Tadi Bapak menyampaikan kepada kita bahwa untuk instruktur dan pengawas itu akan diusahakan untuk mengambil dengan cara kontrak, sementara kita kan tahu Pak hari ini *outsourcing* itu kan sekarang sedang diributkan, nah kalau Departemen Tenaga Kerja sendiri melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan perburuhan apa jadinya Pak, itu menjadi perhatian Pak, jadi tidak boleh Departemen Tenaga Kerja justru melegalkan *outsourcing* itu untuk Tenaga-tenaga pendamping, nah satu hal lagi saya juga tidak melihat sampai hari ini tenaga pendamping untuk klaim asuransi, tenaga TKI kita, sehingga klaim-klaim yang selama ini dilakukan oleh kawan-kawan TKI itu dari 100 klaim hanya 20 yang bisa diselesaikan, semuanya terkait dengan masalah dokumen yang tidak lengkap dan kemudian ditolak, nah apa tanggung jawab dari Pusdiklat tenaga kerja Bapak terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah klaim-klaim yang legal ini? Ini kan tanggung jawab Departemen Tenaga Kerja juga yang TKI-TKI kita yang memang kualitasnya masih rendah, mereka tidak berpendidikan, bagaimana mereka bisa menyelesaikan klaim itu kalau tidak didampingi oleh pengawas atau pendampingan dari Departemen Tenaga Kerja untuk masalah klaim ini. Makanya angka presentase klaim yang bisa diselesaikan itu minim, nah ini harus menjadi perhatian, jangan lagi kemudian bicara masalah mau *outsourcing*, tolong diperhatikan Pak *outsourcing* kita ini mau kita hapus sedikit demi sedikit, memang tidak gampang untuk menghapus *outsourcing*, saya tahu persis bagaimana kebutuhan Perusahaan-perusahaan di Indonesia ini terhadap tenaga *outsourcing*, namun ini bisa kita minimalis tahun demi tahun, bukan malah tenaga kerja sendiri, Departemen Tenaga Kerja sendiri malah melegalkan *outsourcing* di tubuhnya sendiri, tolong itu jadi perhatian Pak.

Terima kasih.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Sebentar, saya persilakan Bapak dan Ibu sekalian.

Bahwa Rapat kita hari ini ke anggaran, hal-hal yang sifatnya pengawasan nanti kita adakan season sendiri.

Silakan Ibu Okky.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih sudah diingatkan bahwa kita fokusnya adalah ke anggaran, namun menurut hemat saya pengawasan atau pun kualitas dari program Kemenaker ini juga kaitannya dengan anggaran. Tadi Bapak katakan bahwa akan diadakan rekrutmen untuk pengawas, apakah ada target begitu dengan anggaran yang RAPBNP ini, tahun ini atau dengan anggaran tersebut akan merekrut berapa tenaga pengawas dan juga darimana perekrutan tersebut, karena berdasarkan hasil rapat yang lalu Kemenaker juga akan membuat Undang-undang yang kaitannya dengan Undang-Undang Perda terkait juga dengan tenaga pengawas ini Pak dan saya juga tadi yang Ibu Irma katakan antara *outsourcing* dan honorer begitu memang ada bedanya ya karena memang kan Menpan moratorium untuk PNS begitu, jadi Kemenaker berpikinya adalah secara kontrak tetapi kemudian apa bedanya dengan *outsourcing* begitu, itu saja. Jadi, saya ingin tahu saja dengan anggaran sekian, tenaga pengawas yang mau direkrut itu berapa.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENAKER RI :

Terima kasih Bapak dan Ibu.

Saya cuman merefer Undang-Undang ASN Bu, yang kedua, saya ingin sampaikan apa yang kami alami saya adalah instruktur kebetulan saja sekarang penunjukkan sementara jadi Sekjen tetapi sejatinya saya instruktur atau guru. Di Balai-balai sekarang ini sudah kekurangan, itu faktanya dan otoritas rekrut yang akan menggaji instruktur untuk DLK-DLK yang dikelola Pemda adalah Pemda sendiri atau Bupati, Walikota, jadi tentu saja kami dengan sangat senang hati dan saya sudah surat secara resmi ke Menpan untuk dibantu instruktur untuk memenuhi kebutuhan termasuk pengawas, tentu itu yang kita harapkan artinya ada permanen staf di setiap unit kerja yang bisa kita pindahkan untuk mengawal pekerjaan fungsional ini, kita sangat sependapat Ibu, hanya saja di dalam Undang-Undang ASN itu kan ada koridornya dibagi dua, ada tenaga kerja PNS pegawai negeri yang permanen, ada yang kontrak. Nah, dalam hal ada kekurangan di tempat tertentu dan tidak ada rekrutmen pelayanan harus jalan maka ini salah satu koridor yang saya bilang tadi mungkin bisa kita manfaatkan, itu pun petunjuk dari Menpan belum turun, begitu Ibu, itu yang saya maksud. Kemudian, sisi lain kalau Ibu ke DLK kami di Bekasi itu sebagian ester dari industri kami berdayakan disitu, karena faktanya untuk fungsional tertentu apabila kita tandem antara PNS dengan ester dan industri di dalam mengajar hasilnya lebih bagus, tentu saja itu untuk Daerah-daerah yang memang area industri tetapi begitu kita bicara lainnya di Kendari di Sulawesi Tenggara memang tidak ada industri mereka disitu, yang memungkinkan mengajar ya mana yang staf yang

harus kita lakukan, jadi kami ini mengikuti kebijakan saja dan saya sangat senang kalau Bapak, Ibu bisa mendorong supaya pemenuhan tenaga-tenaga fungsional terutama di unit-unit tekniskan itu prioritas, ya tentu saja itu yang akan kami prioritaskan.

Kemudian, selanjutnya untuk diklat pengawas Ibu yang kami targetkan 300 orang yang menjadi target dari anggaran, tentu saja ini juga kami masih was-was Bu terus terang saja pengalaman kami untuk fungsional ini kita targetkan 300 orang tetapi real rekrutnya kadang-kadang juga kurang karena jumlah yang apalagi sekarang ada *passing great*, kalau dulu Ibu sebelum ada sistem *passing great* kalau kita merekrut tenaga pengawas 100, butuh 100 kemudian yang mendaftar 150 tinggal dipotong nilai tertinggi kita dapat 100, kalau sekarang faktanya rekrut Tahun 2014 kita butuh instruktur 1000 umpamanya yang lulus kurang dari 1000 maka itu yang diproses lebih lanjut. Jadi, memang dengan memberlakukan *passing great* tentu bagus tetapi konsekuensinya adalah karena kapasitas pendidikan dari sabang sampai merauke belumlah merata kualitasnya, ini kami pengalaman di Papua merekrut instruktur Ibu mohon maaf yang lulus itu di Papua sekitar kurang dari 10, ini fakta, jadi saya mengamati ujian di Makassar itu setiap kelas itu 30 orang untuk ujian yang lulus 2, 3, 5 ini faktanya jadi ini pekerjaan kita sehingga dalam konteks kontrak, dalam hal tertentu mohon ijin terpaksa kita lakukan tetapi kami sangat sependapat kalau itu permanen staf bisa kita bikin itu yang paling bagus, selanjutnya adalah terkait dengan hal-hal yang menjadi tugas bina latas mohon ijin Pimpinan nanti akan dielaborasi oleh bina latas dalam konteks bagaimana penyiapan tenaga kerja terampil untuk menjawab kebijakan penurunan tenaga kerja informal untuk dikirim ke luar negeri, mereka akan menjelaskan itu untuk itu.

Kemudian, yang terkait dengan perundang-undangan yang memang kami akui Bapak memang ini masih banyak yang belum selesai, yang terkait dengan ini apalagi dengan di era reformasi ini, saya contohkan saja kita punya PT. Juklak Ternak tetapi Perda-perda di daerah juga belum siap dan belum ada yang dibuat, nah kami mengasistensi Pemda-pemda bagaimana supaya fungsi-fungsi yang terkait dengan ketenagakerjaan desa itu dalam Perda-perda dan yang terkait dengan penyelesaian yang khusus mengenai hubungan industrial insyAllah nanti akan dijelaskan secara detail di PHI Pak, karena itu sangat *technical* sedangkan yang kami lakukan adalah memfasilitasi unit teknis, memfasilitasi substansi tetap di unit teknis, laporan yang terlalu banyak mohon ijin ini Bu kami masukkan formal laporan dan kami tentu sangat berbahagia umpamanya laporan keuangan yang sangat rutin itu setiap tanggal 5, setiap bulan tanggal 5 kami kirim ke Kementerian Keuangan, tanggal 28 paling lambat, ini memang harus dijilid, dibaijinding dan kalau kami tidak lakukan itu salah, jadi memang ini harus ada kebijakan nasional tentu kami akan sangat senang, ada pun yang tidak seperti itu katakanlah dalam konteks penerapan *paper less*, saya cuman bisa menjawab beri kami ijin tahun ini membangun e-government kami insyAllah ini kami akan bangun *paper less*nya dan ini sudah menjadi instruksi Bapak Menteri dan insyAllah kita akan kembangkan ini karena tidak bisa hanya parsial-parsial, memang harus ada sistemnya dan juga harus menyiapkan SDMnya mohon maaf tidak semua juga pejabat ini *..(tidak jelas)..* dengan IT dan lain-lain tentu

ada bimbingan teknis, paling tidak ada diklat-diklatnya tentu kami akan ikuti itu Ibu mengenai *paper less*.

Kemudian, sosialisasi tentu kami disini sosialisasi yang memang target utama yang *stakeholder* kami tetapi dalam hal sosialisasi di unit-unit teknis tetap jalan dan ini tentu ada di fungsi masing-masing, itu yang bisa kami sampaikan dalam konteks ini. Kemudian, pelibatan dari komisi dan sosialisasi insyAllah menjadi tanggung jawab untuk kami komunikasikan terhadap kegiatan-kegiatan sosialisasi, ini bisa dicatat saya *..(tidak jelas)*...kemudian, kami dalam konteks pelayanan umum kami mewadahi pelayanan-pelayanan dan salah satu fasilitas dari Sekjen adalah menyiapkan ruang untuk pelayanan terpadu, ini tentu baru selesai pembahasan ini, kalau sudah disetujui kami akan revisi anggarannya dan itu akan kami laksanakan. Sedangkan pembangunan gedung tidak ada Ibu, yang ada adalah kami di biro keuangan umpamanya kemarin berkantor di Kalibata karena itu menjadi kantornya Kementerian Desa sekarang, kami juga siapkan kantor biro keuangan, biro perencanaan, kemudian Birembang itu belum ada kantornya, yang kami lakukan hanya mengatur sekat-sekat di gedung yang sudah ada di Gatsu sekarang, itu saja Bu, jadi maknanya tidak ada pembangunan baru tetapi harus kami siapkan karena memang ada perubahan organisasi, sekiranya tidak ada tentu tidak ada ini semuanya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Interupsi Pimpinan.

Mohon ijin.

Saya kalau laporan keuangan harus begitu ya pasti kita tidak mungkin melarangnya tetapi mungkin ke depannya dari Kementerian Keuangan juga harus ada perbaikan tata cara sistem pelaporan yang lebih baik, hanya saya tetap ingin mengetahui dari setiap ini kan misalnya di pengelolaan urusan, dari pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum, saya kira ini anggarannya paling besar ya Pak, Rp.93 miliar dan untuk kasus hukum karena barangkali teman-teman dari Kementerian juga tahu saya sering sekali bahwa kasus, jumlah kasus itu lebih dari 30 lah, yang harus diselesaikan itu banyak sekali ratusan barangkali, itu saja yang baru terdata. Jadi, Pak Sekjen entah bagaimana caranya saya minta bantuan kepada Pak Sekjen untuk merealokasi anggaran di biro hukum ini diperbesar, tidak bisa Pak kasus itu banyak dan saya kira saya cukup tahu bagaimana kerja Teman-teman bagian penanganan kasus ini juga tidak gampang, sudah dimaki buruhnya, kadang diomeli pengusaha juga, harus keliling dan sebagainya dan kemudian juga harus bertanggung jawab atas sosialisasi, saya tetap juga penting ada entah darimana realokasi yang bisa Saudara Sekjen lakukan untuk sosialisasi perundang-undangan meskipun ada di tempat lain, tetapi biro hukum ini adalah bagian yang paling bertanggung jawab terhadap sosialisasi hukum di eselon yang lain juga, di program yang lain juga sehingga menurut saya, saya tetap tidak bisa menerima untuk kedua hal ini terutama sosialisasi peraturan perundang-undangan hanya pesertanya 450 orang itu mah sekali pertemuan juga bisa Pak.

Kemudian, kasus hukum yang diselesaikan hanya 30 sekali lagi banyak persoalan hukum yang terjadi di Ketenagakerjaan namun politik anggaran yang Bapak sampaikan ini saya tidak melihat bahwa ini politik anggaran yang ingin menyelesaikan persoalan hukum ketenagakerjaan, mohon minta bantuanlah kalau begitu, saya minta bantuan sekali lagi bagaimana politik anggaran kita adalah politik anggaran yang ingin menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan melalui jalur hukum bukan dia di LAN ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan dan mohon ini menjadi catatan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan dilanjutkan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENAKER RI :

Terima kasih Ibu.

insyAllah saya akan memaksimalkan, cuman memang di biro umum ini memang segala listrik disitu, segala perawatan gedung dan sebagainya memang ada disitu dan ada tambahan tadi disitu karena 3 biro yang di Kalibata itu fasilitasnya kita tidak bawa karena kita sadar bahwa Kementerian Desa juga akan tetap butuh kursi, butuh meja dan kita tidak bawa, yang baru kita adakan baru hanya itu, jadi insyAllah cukup standar dan kami akan perhatikan Ibu insyAllah ada revisi untuk internal.

KETUA KOMISI IX DPR RI (F-PD/DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST.,M.Si) :

Interupsi sebentar Ketua.

Mohon ijin Pak Sekjen.

Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rieke tadi bahwa sosialisasi undang-undang dan juga masalah status-status. Kemarin waktu kita Raker saya juga menyampaikan agar masalah hukum ini menjadi sebuah prioritas tetapi saya tidak tahu apa itu masuknya di PHI atau di Kesekjenan, nanti kita kan belum ada PHI ya, saya ingin tahu pembahasan masalah hukum itu masuknya dimana tetapi konteksnya dari apa yang disampaikan itu saya sangat setuju sekali.

Silakan Pak.

SEKJEN KEMENAKER RI :

Terima kasih Bapak.

Betul Pak, jadi memang yang relevan dengan unit teknis itu ada disana, jadi kami ini banyak-banyak dari sisi perumusan-perumusan dan *back up-back up* fasilitasi tetapi eksekusinya ada di unit teknis begitu Pak, jadi katakanlah kita berbicara masalah TKI yang bermasalah itu ada di Bina Penta *supporting* nya ada disitu tetapi kami ini dalam konteks fasilitasi katakanlah ada draft Intermen, keputusan, kami fasilitasi untuk itu tetapi substansi penyusunannya sampai kayak Bapak sudah biasa

perumusannya ada disana, sedangkan memasukkan dalam sinkronisasi bahasa hukum ada ...*(tidak jelas)*...begitu Pak, konteksnya begitu. Demikian juga dengan penyelesaian masalah itu katakanlah hubungan industri ada di PHI, kepebenawasan ada di Binangwas.

Terima kasih Pak.

Selanjutnya adalah untuk *road map* tenaga pengawas Ibu Okky insyAllah nanti di Binangwas akan menyelesaikan karena itu ada disana substansinya. Kemudian, yang terkait dengan pembaruan dengan masalah hukum dan lain-lain ya memang kami sekarang *strugling mengupdate* karena terus terang saja banyak regulasi masih terutama di tingkat PP, Permen ya itu masih kami *updating-updating* dan juga di daerah banyak regulasi di masa sentralisasi masih menjadi pegangan di daerah, di semua fungsi dan tenaga kerja maksud saya dan ini harus di *updating*, saya kira disesuaikan dengan Undang-Undang Otda, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan relevan regulasilah, itu maksudnya Ibu. Kemudian, tenaga pendamping nanti tentu saja kami di Pusdiklat itu menyiapkan seluruh diklat-diklat yang ada di unit teknis dengan kapasitas yang ada, ya ini kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas yang ada, tentu kalau masih ada kekurangan tentu ya dukungan semua pihak bagaimana mengekspos kebutuhan itu secara cepat dan tentu akan jadi perhatian kami semua dengan sumber daya yang ada.

Demikian Bapak Pimpinan dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Irjen.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENAKER RI :

Terima kasih Pak Pimpinan.

Kami menjawab pertanyaan dari Pak Handayani, mohon koreksi Pak kalau salah. Terkait dengan opini BPK benar apa adanya Pak saat ini masih wajar dengan pengecualian dan sebagaimana tadi diungkap Pak Sekjen di jajaran Kementerian masih mengandung beberapa kelemahan Pak, kalau Bapak tanya penyebab masalahnya apa, utamanya adalah penatausahaan BMN dan khususnya yang utamanya di Daerah-daerah dan sebagaimana tadi uraian Pak Sekjen bertekad akan menyelesaikan tetapi kami Pak Handayani bertekad untuk mengawal, untuk menyelesaikannya sehingga nanti mengacu kepada WTP Pak dan satu hal lagi terkait kepada kepatuhan, terima kasih Pak, disiplin aturan belum optimal masih ada penyimpangan disana sini tetapi bentuk penyimpangan itu sudah terinventarisir tinggal lagi menanti pengembalian kas negara yang tentunya pengaturan main dalam waktu penyelesaiannya, sekali lagi Pak Handayani kami bertekad untuk nanti menjadikan WDP menjadi WTP, kami akan mengawal seluruh kegiatan yang terkait dengan Kesekjenan, terkait dengan laporan keuangan dan terkait dengan BMN ini.

Kemudian, ke Pak Muhammad mohon maaf kalau salah sebut nama.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M. Hum) :

Muhammad Ali Taher Parasong, Parasong itu bahasa bugis Pak, tempat orang berkumpul artinya.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENAKER RI :

Ini akan kami coba nanti Pak, memang benar adanya Pak, salah satu indikator dari penataan RB itu adalah pelayanan publik Pak, sebagaimana kita ketahui di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja pelayanan publik itu ada dua terkait dengan TKI dan satu lagi tenaga kerja asing dan saat ini masih dalam pembenahan khususnya ruangan sebagaimana tadi maaf Pak Sekjen dijelaskan oleh Pak Sekjen dan kami nanti akan selipkan aspek 5 (lima) salam ini Pak, akan kami langsung panggil nanti direktornya terkait dengan masukkan dari Anggota Dewan yang terhormat.

Kemudian, Pak Pimpinan kami menjawab pertanyaan Ibu Okky. Ibu Okky, memang di slide di paparan kami ini nanti akan kami lengkapi tetapi perlu kami jelaskan menyangkut *output* khususnya *output* 2171 kesekretariatan dari Rp.37.340 miliar ini hampir Rp.22 miliar itu adalah gaji dan tunjangan, sisanya kurang lebih Rp.5.514 miliar adalah operasional kantor, ATK dan lain sebagainya ditambah tugas pokok yang menunjang pelaksanaan pengawasan Bu. Lebih lengkapnya mungkin ada waktu paparan selanjutnya kami berjanji akan kami lengkapi. Untuk *output* 2167 sampai 2170 ini adalah untuk membiayai tugas-tugas kepengawasan, seperti audit kinerja, supervisi koordinasi dan review laporan keuangan, evaluasi Lakit, ini semua diarahkan untuk membiayai tugas-tugas kepengawasan yang didalamnya adalah unsur-unsur pemeriksaan, namun Bu Okky kami ke depan juga akan berusaha mengirit biaya sedemikian rupa sesudah mungkin ada persetujuan atau setelah mendapatkan pembahasan dari Anggota Dewan yang terhormat ini kami akan melakukan revisi untuk melihat lagi mana-mana yang akan dilakukan efisiensi, kami akan berjanji akan melakukan. Pak Pimpinan, kurang lebih itu penjelasan dari Inspektorat Kejenderal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal.
Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH.,MM) :

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oh Pak Suroso, sudah kembali.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH.,MM) :

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX DPR RI.

Untuk Pak Sekjen dan Irjen, tadi Pak Irjen mengatakan pada teman kita bahwa pengawasan kurang maksimum. Jadi, saya mohon dijelaskan untuk ini kan tambahan Inspektorat Rp.3,26 miliar tambahannya saja untuk apa? Tadi diantaranya untuk tunjangan gaji, kenaikan, tunjangan kerja, walaupun APBN ini juga dapat tetapi dapat kenaikan gaji, lah ini Pak mohon dijelaskan kira-kira yang kena sanksi Nakertrans ada yang penyalahgunaan wewenang, ada yang bolos tidak mau kerja, dableg, jadi mohon Pak disampaikan juga langsung saja, kira-kira yang kena sanksi itu sekitar berapa, terus karena nakalnya dipecat itu berapa, jadi ini menurut saya penting Pak.

Terus yang kedua Pak, ada tidak Pak sistemnya *reward and punishment* ini yang Pak Irjen sampaikan.

Itu saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ya direspon Pak Sekjen atau Pak Irjen singkat saja.

SES IRJEN KEMENAKER RI :

Terima kasih Pak Imam.

Dalam rangka pengelolaan tertib keuangan dan pertanggungjawabannya Pak Imam, kami sudah melakukan dengan hukuman, untuk Tahun 2014 ini cuman rinciannya Pak Imam akan kami sampaikan sekitar 6 orang, itu terkait dengan ketidaksiplinan sama ada juga kurang lebih 4 orang turun pangkatnya dan bebas jabatannya juga 1 orang, kami sudah berusaha melakukan *reward and punishment* ini Pak Imam dan ke depannya juga ini akan kami tingkatkan terkait dengan tuntunan reformasi birokrasi juga Inspektorat Jenderal juga dituntut manakala kita membahas hingga kenaikan gaji dan tunjangan kinerjanya.

Terima kasih Pak Imam.

KETUA RAPAT :

Cukup ya?

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH.,MM) :

Tambah sedikit Ketua.

Ini Pak Irjen, Teman-teman akan membantu sesuai permintaan agar gaji, tunjangan jalan tetapi tolong setelah ini sampaikan bahwa ada tunjangan naik kerjanya dimaksimumkan, kalau perlu ada terobosan-

terobosan Pak bagaimana untuk menguntungkan rakyat, ketenagakerjaan dan menguntungkan negara.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya saya kira itu masukkan terakhir tadi tolong diperhatikan.

Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Setelah kita melakukan pendalaman tukar pikiran yang cukup mendalam antara Anggota Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal maka kita tiba pada acara terakhir yaitu menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dan menjadi acuan, menjadi pedoman bagi Pak Sekjen dan Pak Irjen untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan artinya sudah dipaparkan tadi dan tentu apa yang menjadi masukkan ini akan dilaporkan dalam Raker nanti yang akan datang.

Oleh karena itu, kita sampai pada kesimpulan, ada beberapa kesimpulan, saya tujukan dulu kepada Anggota Komisi IX DPR RI.

1. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI dapat meningkatkan kinerja program dan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan yang pada Tahun 2014 mendapat opini wajar dengan pengecualian dari BPK menjadi memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada Tahun Anggaran 2015 dan tahun-tahun anggaran selanjutnya.
2. Komisi IX DPR RI memberikan catatan terhadap capaian kinerja program dan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Tahun 2014 sebagai berikut :
 - a. Realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2014 hanya 90,9% dan realisasi Inspektorat Jenderal mencapai 95,92% yang belum optimal.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor lain khususnya dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perhubungan dan lain-lain.
 - c. Mengoptimalkan informasi birokrasi Kementerian Tenaga Kerja RI.
 - d. Mengalokasikan program dan kegiatan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat sehingga tujuan dari nawakerja ketenagakerjaan dapat tercapai dengan baik, dengan melibatkan representasi Anggota Komisi IX DPR RI berdasarkan aspirasi daerah.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh masukkan dan saran-saran Anggota Komisi IX DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.
4. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI untuk mengambil keputusan terkait

pembahasan RAPBNP Tahun 2015 Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI.

Jadi, setelah membahas mendalam hari ini keputusannya nanti akan kita ambil bersama-sama dengan Menteri. Itulah Bapak dan Ibu sekalian draft kesimpulan dari RDP kita pada pagi hari ini.

Silakan ada masukkan?

F-.../ANGGOTA :

Interupsi Pimpinan.
Pimpinan ijin.

KETUA RAPAT :

Ya.

F-.../ANGGOTA :

Saya minta kalau bisa dimasukkan di dalam draft kesimpulan itu soal masalah pembangunan dan pengembangan sistem elektronik dan juga direncanakan oleh Kesekjenan. Jadi, jangan ada lagi nanti tahun berikutnya kita bicara dokumen-dokumen lagi begitu loh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Di poin 2 e ya.

Jadi, tambahan poin 2 e, *Komisi IX DPR RI meminta kepada Sekretariat Jenderal dan seterusnya ya.*

Cukup begitu Pak Alex?

Kadang-kadang meja itu sekretariat itu penuh hanya pejabatnya tertutup dengan dokumen-dokumennya, dengan sistem ini tinggal 1 chip.

F-.../ANGGOTA :

Usul Ketua.

Kata *membangun* itu mengadakan mungkin, saya usul kata *membangun* itu menjadi *mengadakan dan mengembangkan*.

KETUA RAPAT :

Untuk *mengadakan dan mengembangkan, membangun* diganti *mengadakan dan mengembangkan*.

KETUA KOMISI IX DPR RI (F-PD/DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST.,M.Si) :

Tetapi ini konsekuensinya kalau nanti kita mengadakan Rapat Kerja, tidak ada bahan nanti kasih chip masing-masing Anggota, berarti di depan

kita nanti harus ada tape, jadi nanti anggaran di Komisi kita harus punya ini.

KETUA RAPAT :

Jadi, saya kira betul tidak hanya kepada Pemerintah tetapi juga kepada DPR RI, ini Anggota punya dokumen sudah segudang tetapi tidak pernah dibaca.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya Bu Okky.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Ya untuk poin f mungkin bisa ditambahkan bahwa *Komisi IX DPR RI meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI untuk mengkoordinir Irjen-dirjen dibawahnya terkait dengan pembuatan road map bagi pemenuhan tenaga pengawas dan juga pengiriman informal pada Tahun 2017.*

KETUA RAPAT :

Coba ditulis.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Mungkin tenaga fungsional ya Pak Sekjen karena termasuk instruktur didalamnya.

KETUA RAPAT :

Komisi IX DPR RI meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI untuk mengkoordinasikan unit kerja eselon 1 di Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi tidak hanya Dirjen tetapi juga Irjen, dalam membuat road map pemenuhan tenaga fungsional pengawas di Kementerian.

Cukup ya?

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Kalau sudah fungsional, pengawas kayaknya tidak usah, karena di fungsional itu ada pengawas dan ada instruktur.

KETUA RAPAT :

Oke, tenaga pengawas di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Serta ini Pimpinan Pak Muhaimin Menteri yang terdahulu berjanji akan membuat *road map* terkait dengan rencananya pada Tahun 2017 tidak hanya mengirim tenaga formal saja, bukan saja informal ke luar negeri. Jadi, *road map* itu juga perlu kita pelajari, kita kawal bagaimana mereka punya tahapan-tahapan untuk melakukan hal itu.

Terima kasih Pimpinan.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR,MBA) :

Pimpinan, kembali ke poin e teknologi disebutnya teknologi yang baik, yang betul.

KETUA RAPAT :

Cukup ya?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya silakan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Saya meminta pertama adalah kalau kita lihat ini display 14 kita bisa melihat dengan jelas bahwa poin 5 tentang biro hukum, ini anggarannya adalah yang terkecil sementara kita tahu ada persoalan entah dari pembuatannya hukumnya, entah dari sosialisasinya, entah penanganan kasus hukumnya yang itu justru menurut saya membutuhkan anggaran yang tidak seperti ini dan kami kalau tadi memohon karena sudah sampai kesimpulan, saya menuntut agar anggaran Biro Hukum ini dinaikkan, saya tidak tahu bagaimana caranya tetapi saya tahu Pak Sekjen ini berpengalaman untuk mengotak-atik dan bisa mengalokasikan supaya panteslah Pak dilihatnya juga, kalau ini kurang pantes begitu, supaya pantes ketika saya *capture* ini, saya *share* ke mesos tentu akan membuat orang heran kenapa dengan kasus hukum ketenagakerjaan yang banyak Kementerian Tenaga Kerja justru mengalokasikan anggaran paling kecil untuk biro hukum. Kemudian, di poin yang terakhir, di biro hukum ya tetapi saya kira tidak perlu terlalu detail karena bukan untuk tambah laporan jadi dokumen lagi ya Pak?

Ijin Pimpinan, untuk meningkatkan alokasi anggaran biro hukum begitu saja titik.

KETUA RAPAT :

Kita fokus kepada hal-hal seperti itu.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M. Hum) :

Ijin Pimpinan.

Yang poin 3, barangkali saya ingin urun rembuk dulu.

Jadi, peningkatan alokasi ini tidak hanya pada biro hukum tetapi pada programnya, jadi saya kira langsung saja pada programnya, jadi alokasi anggaran untuk program pembentukan, pembaruan dan penyelesaian masalah hukum jadi tentu nanti akan tercermin didalamnya nanti uraiannya yang lebih detail barangkali itu yang dilakukan, saya kira itu Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Jadi, saya kira betul ya pada programnya tidak pada unitnya, jadi bisa saja di unit lain kita di biro hukum tetapi masalahnya adalah penyelesaiannya masalah hukum di sektor ketenagakerjaan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Pak, kalau begitu masukkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

KETUA RAPAT :

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di sektor ketenagakerjaan, oke? Cukup ya?

F.../ANGGOTA :

Kalimatnya Ketua.

KETUA RAPAT :

Bagaimana?

F.../ANGGOTA :

Kata pembaruan itu apa? Program pembaharuan? Tidak nyambung kalimatnya.

KETUA RAPAT :

Komisi IX DPR RI meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka

penyelesaian permasalahan hukumlah saya kira ya, program pembaharuan itu hilang, kalau pembaharuan itu secara keseluruhan, anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di sektor ketenagakerjaan.

Cukup ya?

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH.,MM) :

Sebelah kanan Pimpinan sedikit.

Penyelesaian hukum, advokasi dan sosialisasi. Hukum, (koma) advokasi, tambah advokasi karena banyak kasus di luar negeri yang dihukum gantung itu butuh advokasi, itu butuh anggaran, jadi harus dimasukkan disitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Penyelesaian masalah hukum itu didalamnya ada advokasi.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH.,MM) :

Tetapi lebih tajam advokasi Pimpinan, itu paling tinggi, itu menyangkut nyawa. Masukkan advokasilah.

KETUA RAPAT :

Kalimatnya jadi tidak nyambung ini.

Permasalahan hukum, advokasi dan sosialisasi, oke biar lebih jelas. Cukup ya dari Komisi? Kalau tidak ada saya persilakan Pak Sekjen untuk merespon.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Belum Pak, sedikit lagi.

Juga untuk kegiatan kehumasan saya meminta juga agar Kementerian juga melibatkan tidak tahu apakah sudah ada keterlibatan kita di dalam kehumasan itu, saya kira itu juga penting. Tetapi di poin terakhir intinya saya minta untuk dimasukkan soal kehumasan ini, jadi yang kelima ini saya memberikan masukkan agar Sekjen merevisi ajuan anggaran sesuai masukkan dan kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI.

KETUA RAPAT :

Di poin 3 ya, *Komisi IX DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh masukkan dan saran-saran Anggota Komisi IX DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.*

Terlalu umum?

Mau lebih fokus?

Fokusnya apa lagi coba.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Kalau menurut saya kalau yang umum-umum itu kan sudah di Rapat dengan Menteri kemarin, karena ini sudah anggaran per eselon 1 maksud saya, itu harus jelas begitu dari Sekjen apa yang kita aspirasi seperti apa, tidak bisa kan aspirasi daerah seperti apa, anda mau nuntut sama Kesekjenan, menurut saya mohon maaf ini ya sekedar *sharring* saja ini untuk internal Komisi IX DPR RI apa begitu, kalau saya, saya merasa memerlukan untuk adanya misalnya sosialisasi hukum ketenagakerjaan, saya membutuhkan, saya tidak tahu Teman-teman lain, kehumasan saya membutuhkan agar ada bantuan peliputan pada kasus-kasus tertentu bersama kita sehingga ada *sharring* anggaran dari Sekretariat Komisi IX DPR RI juga dari Humas Kementerian Tenaga Kerja, karena tidak cukup kalau kita pergi kunjungan spesifik dan sebagainya ada masalah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari kami tetapi kami minta juga ada *sharring* anggaran dan bantuan peliputan media dari Kemenaker, jadi saya minta kejelasan dalam hal ini begitu ya karena perlu ada yang lebih dijelaskan setelah pengalaman dari 5 tahun kemarin, jadi pembentuk program nawacita kerja saya merasa tidak perlu, itu sudah kemarin, saya minta kalau boleh Teman-teman ijin dalam kesimpulan rapat sekarang ini betul-betul terfokus begitu apa yang bisa kita perjuangkan bersama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada saran baru?

F-PG (H. BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Budi.

F-PG (H. BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH) :

Maaf Pimpinan dan Anggota serta mitra kerja kita, saya datang terlambat.

Memang setelah saya baca ini sepiantas saya pun tidak mudeng, saya tahu bahwa ini akibat keputusan MK yang katanya DPR RI tidak boleh membahas satuan tiga sehingga kita seperti ini tidak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi, kalau Teman-teman tahu itu bohong dan kita membohongi diri kita sendiri, jadi secara detail iya-iyanya tetapi itu saya yakin teman-teman bohong, setelah keluar nanti pasti bertanya apa sih sebenarnya, karena kita tidak tahu, tetapi inilah nanti kalau kita dikatakan beda pendapat soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya ingatkan kembali yang diajukan ini adalah kita membahas Rancangan Undang-

Undang APBN jadi sama dengan membahas undang-undang biasa, saya ingatkan saja sehingga keputusan-keputusan ini sebenarnya menjadi satu kesatuan di dalam lampiran undang-undang itu, jadi kalau kemudian ...*(tidak jelas karena suara rekaman berisik)*... jadi kita ini seperti orang buta meraba-raba tetapi monggo Teman-teman ya kita setuju saja, toh inilah yang dikehendaki jadi kita tidak tahu tetapi pura-pura tahu. Jadi, saya ingatkan yang tidak boleh dibahas satuan tiga itu adalah pada saat itu sudah menjadi undang-undang, dulu kan begitu APBN tok Kemenaker sekian triliun, sekian triliun, kita dulu setuju gelondongannya baru kita bahas satuan tiganya, itu yang tidak benar karena kita merubah undang-undang, ini sebenarnya. Nah, ini kita sekarang menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang APBN, kalau kita tidak tahu titik komanya undang-undang percuma kita setuju, ini bohong nanti, ini pandangan saya, saya siap berdebat sebenarnya tetapi juga tidak ada artinya kita berdebat. Sudah sering saya ingatkan juga pembahasan undang-undang APBN pada tahun lalu ya, ini kita mengerti apa-apa kok, jadi kalau Teman-teman mengerti itu bohong. Jadi, kita setuju apa yang kita tidak tahu, jadi mohon maaf ini perlu saya sampaikan jadi kadang-kadang kita harus berbeda pandangan bahwa ini adalah untuk kebaikan, jadi ini nanti akan jadi satu kesatuan, kenapa sih anggaran Sekjen harus sekian triliun, harus sekian ratus miliar, inilah dibahas dari bawah kemudian satu kesatuan menjadi lampiran, dari Komisi kepada Banggar, Banggar setuju kan begitu setelah itu dibawa pada Paripurna DPR RI menjadi Undang-Undang. *Oh kenapa Kemenaker itu dapat misalnya 3 koma sekian triliun*, ini loh perinciannya seperti ini, ini loh kegunaannya untuk ini, itu cara pandang saya.

Jadi, saya pikir juga waktu itu diajukan uji materi MK saya pikir yang mengajukan tidak mudeng, MK nya tidak mudeng, mohon maaf karena apa? Pada waktu itu memang benar gelondongan diketok, baru dibahas di Komisi dengan mitra kerja sehingga inilah kita merubah undang-undang, geser-geser ini, ini baru rancangan kok ya, kalau sekarang misalnya biro hukum hanya sedikit boleh kita minta 25 miliar untuk biro hukum yang lainnya kecil, ini harus kita perdebatkan. Kenapa biro hukum hanya sekian? Mau membangun apa? Kita berdebat, *reasoning* nya apa dan kita bisa setuju dan tidak setuju. Ini penjelasan saya. Jadi, menurut saya Pimpinan tidak usah terlalu banyak kesimpulannya, toh nanti kita juga bawa dalam atau dengan Menteri baru disitu kita akan bicara seluruh anggaran Kemenaker tetapi ada saran-saran dari Teman-teman misalnya tadi ditambah, dikurangi masih bisa kita geser kok dan kita bisa misalnya saya tidak paham tentang Kementerian, *oke kenapa ini harus dibangun gedung 25 tingkat?* Saya bilang ini tidak benar, saya tidak tahu, saya bisa mengundang ahli dalam rangka apa? Ini benar tidak? Karena apa? Membuat undang-undang, meskipun undang-undang yang kita buat ini adalah RAPBN, sama seperti kita membuat undang-undang apa sajalah, kita tidak mengerti, narasumber kita panggil.

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingatkan tidak usah terlalu bertele-tele.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Masih ada? Ya silakan Pak Khaidir.

F-GERINDRA (KHAIDIR) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya hanya ingin tanya satu ke Pak Sekjen berkenaan dengan kegiatan dan indikator yang ada Pak. Dari sekian unit kegiatan yang ada saya kira kendaraan roda empat tahun ini yang akan dibeli kira-kira berapa banyak Pak? Salah satunya, ijin Pimpinan mohon dijawab langsung.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :

Tambahan sedikit Ketua.

Saya hanya ingin menegaskan kembali masalah peningkatan, pengelolaan dan pelaporan keuangan ini kan ada 9 *output* dengan besaran Rp.105 miliar, sementara di poin 5 pembentukan, pembaruan dan penyelesaian masalah hukum itu hanya 16. Saya minta *output-output* ini di *break down* lagi, di detail lagi supaya kami tahu program-programnya apa saja di 9 *output* poin 3 dan 9 *output* di poin 5 sehingga kami tahu persis apa yang dilakukan oleh untuk peningkatan, pengelolaan dan pelaporan keuangan ini dengan dana Rp.105 miliar itu, saya kira itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ya masih ada dari Anggota?
Cukup ya? Silakan Pak Sekjen.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Tunggu sebentar Pimpinan.

Saya tidak tahu, mohon maaf yang menulis kesimpulan. Saya kira tadi kita sudah panjang lebar, mohon dilihat lagi mana yang perlu masuk, mana yang cuman basa basi tidak usahlah, sudah yang panjang lebar itu.

KETUA RAPAT :

Yang basa basi mana, yang tidak mana, coba disebutkan lagi.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Karena kami tidak memegang lembar *copyannya*, yang ini okelah karena dengan penilaian. Nah, seperti meningkatkan koordinasi ini maksud saya begini ini ada kaitan dengan pembahasan tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Budi, yang harus kita gali ini dari setiap biro yang

ada ini apa begitu, apa yang ada di setiap biro ini, bukan menyuruh koordinasi ya Pak, itu sudah tidak perlulah. Mengoptimalkan reformasi itu tidak perlu, sudah yang kayak-kayak begini itu setiap rapat 5 tahun kemarin isinya itu semua. Nah, tadi kan jelas tentang Teman-teman ada soal IT, masukkan soal IT ini penting, soal biro hukum, soal Mbak Okky tadi, soal peningkatan pengawasan dan sebagainya, soal humas, jadi lebih mengerucutlah Pimpinan dan saya juga sebenarnya ingin tahu ini Mas Budi dengan ini apakah di rapat yang lain atau bagaimana Pimpinan tetapi jelas penting karena anggaran kayak begini kami dulu yang biasa bisa tahu misalnya kenapa kita bisa ngomong *oh dokumen ini rasanya tidak perlu terlalu besar*, ini laporan dokumen, coba kalau dirinci nanti pernah ada 1 dokumen Rp.1 miliar, hal-hal seperti saya kira, justru yang saya butuhkan kalau saya bagaimana caranya ada revisi anggaran dari Sekjen yang membuat kita tahu apa yang kita setuju, coba apa yang kita setuju itu, saya berani memasukkan kesimpulan soal sosialisasi, undang-undang dan sebagainya karena saya tahu itu penting tetapi sisa yang lainnya ini jujur saya tidak tahu, saya tidak tahu apakah Teman-teman yang lain tahu kalau saya paling tidak berdua sama Mas Budi tidak tahu, nah artinya masa kita mau menyetujui yang tidak tahu? Jadi, saya bingung ini kok saya jadi kayak oneng lagi begitu ya, ini kan uang rakyat tidak bisa saya...

F-.../ANGGOTA :

Melalui Pimpinan, saya pun tidak tahu.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) :

Jadi, kan supaya adalah satu kesimpulan supaya Komisi IX DPR RI ini tahu kita meminta Kesekjenan merevisi anggaran yang supaya Anggota Dewan ini tahu apa yang disetujui dan ini berlaku untuk semua Eselon yang lain. Begitu Pimpinan.

Terima kasih.

F-GERINDRA (ROBERTH ROUW) :

Interupsi Pimpinan.

Roberth Rouw dari Papua.

Saya kira saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Budi dan Mbak Oneng ini, kami ini baru masuk disini jadi kalau yang senior saja yang lama bingung, kami paling bingung ya kan? Kami baru masuk disini padahal kami jelas undang-undang mengamanatkan kami untuk sebagai pengawas, sebagai memutuskan anggaran juga, memutuskan anggaran bersama Pemerintah tetapi kami baru masuk disini terus kami dipagari dengan ada keputusan MK, yang saya tanyakan kami hanya boleh mendengar, selesai, menyetujui, kami tidak tahu, berapa kayak tadi Ibu Rieke sampaikan yang diperlukan oleh masyarakat itu apa, bahwa itu penegakan hukum tetapi masih banyak sekali yang terbengkalai, dengan anggaran segini ini bagaimana ya kan? Kok kita tidak boleh tahu ini pakai anggaran berapa, 30 ini berapa sih duitnya kasus ini ya kan? Padahal kita ini kan bahas rancangan undang-undang, kecuali kalau kita

bongkar itu undang-undang, ini sudah jadi, baru rancangan, rancangan ini kan kita harus tahu semuanya berapa untuk ini, kemana saja dia, makanya tolong Saudara Sekjen Kemenaker tolong dibedah itu, kasih ke kami begitu, jangan cuman kasih ke kami global-global lihat itu, kami tidak tahu isinya cuman kami tahu saja *oh ini ada bundaran besar*, ini isinya nanti kemana-kemana kami tidak tahu, berapa saja uraian itu ya kan?

Jadi, saya kira Ketua jangan sampai kami nanti keluar dari sini besok-besok rakyat akan menuntut kami karena kami dianggap mengkhianati rakyat, amanat undang-undang jelas kami itu, saya kira itu. Jadi, Bapak-bapak Sekjen dan Irjen tolong jangan berlindung lagi dibawah MK yang sudah memutuskan itu untuk kami dikurang, tidak, kami punya dasar hukum juga untuk itu dan kami sumpah di depan gedung ini disana untuk memperjuangkan aspirasi konsituen kami, itu kami sumpah disana, konsituen kami apa? Ya rakyat, jadi kebijakan Bapak untuk rakyat, kami harus tahu rakyat kami dapat berapa, berapa begitu, kalau kami tidak tahu, kami main setuju saja besok Bapak keluarkan sekian, rakyat akan berteriak kepada kami bagaimana kalian yang disana itu memberikan mandat untuk bisa mewakili kami untuk melihat program untuk kami.

Saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR,MBA) :

Pimpinan, sedikit saja.

KETUA RAPAT :

Ya Pak Djoni.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR,MBA) :

Tadi yang butir 3 e itu saya yang angkat permasalahannya menyuarkan itu sehubungan dengan kegiatan di biro kerja sama luar negeri, jadi bisa saja kegiatan kerja sama luar negeri itu terjadi di Kementerian-kementerian lain, makanya diperlukan koordinasi antara beberapa kementerian yang terkait. Jadi, mohon tetap dicantumkan, saya tidak yakin kalau antar beberapa kementerian itu sebelumnya sudah ada.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi, memang itu kesimpulan harus kita sepakati bersama ya semuanya, ada diusulkan oleh Anggota tetapi Anggota lain tidak setuju memang kadang-kadang jadi problem.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Memang pembahasan kali ini agak membuat kita agak bingung. Beberapa tahun yang lalu saya memimpin Rapat-rapat seperti ini Kementerian itu melaporkan secara rinci foto copy berapa lembar,

perjalanan berapa lembar, sekarang tidak lagi, ini problem kita, pemerintah tidak berani melaporkan secara rinci kepada DPR RI, ini persoalannya, jadi meskipun kita minta itu tidak akan disampaikan dan saya baca juga surat Sekab menyampaikan perintah kepada seluruh Kementerian untuk tidak menyampaikan uraian secara rinci berdasarkan kegiatan. Jadi, ini ada dikotomi yang agak sulit kita temukan antara keinginan DPR RI menggunakan pola lama dengan apa yang dipahami Pemerintah dari MK. Argumentasi DPR RI adalah bagaimana kami mau menyetujui program, kami tidak tahu apa isinya program itu, ini logikanya. Bapak, Ibu meminta kami untuk menyetujui kami tidak tahu apa isinya itu, tentu rasionalitasnya adalah kita baru bisa mengatakan ya atau tidak kalau kami tahu apa isi dari kegiatan itu. Jadi, kita ambil saja jalan tengah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita coba-coba mulai poin 1 tadi, saya kira tidak masalah karena ini dukungan Komisi IX DPR RI kepada Kementerian mencapai WTP, terus ya ini juga penilaian komisi bahwa penyerapan anggaran tahun lalu belum optimal saya kira betul, ini merupakan kritik kepada pemerintah supaya lebih optimal ke depan.

Kemudian, poin 3 sistem teknologi informasi saya kira ini harapan semua, kemudian berikutnya adalah koordinator Kementerian, saya kira koordinasi tidak apa-apa, anjuran supaya meningkatkan koordinasi saya kira tidak ada masalah, terus poin 5 meminta kepada Sekretariat Jenderal dan seterusnya *road map* ya terus, poin 6 Sekretariat Jenderal untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, advokasi, sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan dan seterusnya Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian secara sungguh-sungguh masukkan saran-saran Komisi IX DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat.

Nah, ini kalau mau disepakati Bapak dan Ibu sekalian untuk menghilangkan keragu-raguan, tidak untuk dibahas tetapi menyampaikan semacam informasi kepada Komisi IX DPR RI rincian masing-masing program supaya Anggota tahu apa isi masing-masing program itu, karena yang dilarang oleh MK membatasinya. MK memutuskan bahwa pembahasan dengan DPR RI hanya sampai pada tingkat program atau satuan dua tetapi sebelum menyetujui satuan dua itu saya minta pemerintah menyampaikan apa isi dari satuan dua itu dalam bentuk program, dari situ kita bisa tahu apakah Pemerintah mendengarkan masukkan yang ada disini atau tidak, kemudian kita kunci pada saat poin 8 ya, jadi disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini dan menyampaikan informasi tentang rincian kegiatan masing-masing program, oh poin 7 ya. Kemudian, kita tutup dengan poin 8 ya, *Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengambil keputusan terkait dengan pembahasan RAPBNP Tahun 2015 Sekretariat Jenderal*, jadi poin 8 ini keputusannya sangat tergantung pada respon pemerintah pada poin 7.

Bisa disepakati ya Pak begitu? Jadi, apa yang disampaikan oleh Ibu Reike tadi apakah sudah tergambar apa yang disampaikan poin 7 itu atau tidak, saya kira demikian Pak Sekjen, bisa diterima?

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Maaf Pimpinan, tambahan sedikit saja.

KETUA RAPAT :

Ya Pak Ansory.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Ya karena ada sesuatu hal datang terlambat juga sama dengan Pak Budi. Jadi, saya tadi telepon asisten saya bahwa bahan ini itu baru ada pagi ini atau saya tidak tahu apakah sudah ada sebelumnya begitu, sementara untuk bahan-bahan yang mengenai anggaran seperti ini, paling tidak untuk seluruh eselon 1 itu harus sampai ke kita sebelum pembahasan 3 hari sebelumnya sehingga bahan-bahan tersebut akan dipelajari oleh TA-TA kita, itu biasanya seperti itu yang berjalan sehingga anggaran Bapak juga memang benar-benar kita juga dari sini koreksi, Bapak juga kerja dengan baik. Saya kira untuk Dirjen-dirjen sebelumnya Pimpinan, sebelum bahan itu sampai alangkah bagusnya kita pending dulu begitu, sebab bahan-bahan itu diterima oleh kita dan itu akan dipelajari oleh TA-TA kita, karena mereka mempelajari terus itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya, jadi Pak Ansory hari kita tidak mengambil keputusan Pak, kita mengambil kesimpulan untuk menjadi *guidence* bagi pemerintah untuk menyempurnakan apa yang telah dipresentasikan tadi. Jadi, kita tidak mengambil keputusan, keputusan kita ambil pada saat dengan Menteri nanti, jadi Pak Ansory nanti bisa lihat apakah RDP kali ini sudah sungguh-sungguh mendapat perhatian dari Pemerintah.

Cukup ya?

Pak Sekjen silakan untuk kesimpulan ini.

SEKJEN KEMENAKER RI :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya kira ini keputusannya kita bisa terima ya dan kita komit untuk melaksanakan terutama dalam konteks koordinasi dan lain-lain, demikian juga catatan-catatan untuk perubahan anggaran di biro hukum, insyAllah saya akan lakukan itu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Pak Pius.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Tambahan sedikit lagi sebelum Pak Pius.

Maaf Pak.

Kalau bisa dari Kementerian membuat surat ke MK atau kalau tidak Pimpinan DPR RI membuat surat ke MK penafsiran daripada keputusan mereka itu mengenai rincian ini, karena pemahaman kita kalau

tidak ada rincian ini buat apa kita, bagus tidak usah rapat begitu kalau kita tidak tahu apa yang mau dibahas. Kayak isi karung kita tidak tahu apa isinya terus kita ini begitu kan, tetapi kalau sudah diputuskan disini, tidak boleh diotak atik kalau sudah kita putuskan bersama, yang benar dari keputusan itu begitu, karena ini Pimpinan ngotot-ngototan ini sekarang ini, Seskab ngotot seperti ini, kita ngotot seperti itu, siapa yang menang ngotot-ngototan ini begitu, karena ini pertama, kalau sempat kita kalah maka 5 tahun ke depan seperti itu tetapi kalau sekarang ini kita ngotot bagaimana rinciannya ya kan, dia tidak tahu bagaimana Pimpinan DPR RI buat surat ke MK jadi jelas kita apa yang kita pijak begitu. Saya setuju tadi Pak Budi, Ibu Rieke dan lain-lainnya, jadi ini serius, daripada nanti kita tidak bahas APBNP ini, jadi harus bagaimana dari Pimpinan Komisi membuat surat ke Pimpinan DPR RI menanyakan ke MK bagaimana sebenarnya ini, perlu tidak kita membuat rincian itu, sebenarnya tidak perlu ya tetapi kalau dia tidak kasih bagaimana, ini siapa yang kuat-kuatan ini, sementara kalau tidak kita ketok juga di Paripurna juga tidak diketok kok, biar Bapak tahu Bapak-bapak ini ya. Seandainya kita tidak setuju maka di Paripurna tidak akan ada juga, ini tidak akan jalan ini, jadi begitu terus, ya bagus kita cari jalan keluar. Pimpinan Komisi membuat surat ke Pimpinan DPR RI menanyakan ke MK, Bapak juga begitu kalau ada Pak Menteri sebenarnya tanya yang sebenarnya kepada Seskab ya bagaimana sebenarnya begitu, karena ini belum diundangkan, jelas tugas kita membuat undang-undang, namanya membuat undang-undang dari A sampai Z harus tahu kemana dia ininya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya Pak Pius.

F-GERINDRA (WAKIL KETUA/PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si) :

Terima kasih Pak Ketua.

Saya sendiri sepekat dengan Rekan-rekan terakhir, dari Pak Ansory, kita harus atur dulu mekanisme pembahasannya seperti apa, karena ini akan jadi patokan di Irjen-irjen yang lain. Kalau mekanisme pembahasannya seperti ini, saya khawatir mengalami hal yang sama menyetujui apa yang saya tidak ketahui, saya khawatir itu saja dan turunan program-program kegiatan yang kita pandang perlu untuk fungsi representasi pengawasan dan lain-lain, jadi tidak tahu tempatnya dimana, kita juga tidak tahu apakah anggaran dalam satu unit kerja salah satu Kedirjenan itu memang pas, cocok dengan tugas TU Poksi mereka, ini kita sama sekali tidak tahu, saya agak ragu-ragu untuk melangkah lagi apabila cara pembahasannya seperti ini kan begitu, saya pikir kita harus membuat keputusan di komisi ini mengenai apa yang kita mau sistematikanya. Ini kan sesi pertama ya, salah satu kesimpulan apa yang kita inginkan bisa dicantumkan sebagai salah satu kesimpulan, sebagai panduan untuk pembahasan di Dirjen-dirjen yang lain.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Poin 7 ini merupakan kesimpulan mungkin win-win lah ya, *Komisi IX DPR RI meminta Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan rincian masing-masing program dan kegiatan kepada Komisi IX DPR RI serta memperhatikan secara sungguh-sungguh masukkan dan saran-saran Anggota Komisi IX DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini.*

Tadi Pak Sekjen sudah mengatakan setuju untuk menyampaikan rincian itu dan tentu ini menjadi bahan bagi Komisi untuk mengambil keputusan pada Raker dengan Menteri yang akan datang.

Saya kira *clear* ya, dengan begitu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati bisa kita akhiri pertemuan ini dengan kesimpulan seperti itu tadi.

KETUA KOMISI IX DPR RI (F-PD/DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST.,M.Si) :

Pak Ketua, ijin sedikit.

Informasi buat Teman-teman, kita rencana memang hari Senin, Selasa dan Rabu konsiyering untuk memperdalam, jadi nanti kita juga minta *break down* deskripsi daripada program-program itu agar di Senin, Selasa dan Rabu itu masuk ke kita juga, karena itu kesepakatan kita, kita tidak ambil Jumat, Sabtu dan Minggu, bahannya nanti kita mintakan. Justru konsiyering itu tujuannya adalah untuk *membreak down* program-program yang ada di tiap-tiap Kedirjenan, karena pada dasarnya kita kemarin sudah membuat jadwal untuk Senin, Selasa dan Rabu, jadi disitulah nanti kita akan membahas untuk dua Kementerian itu.

Demikian Pak Ketua.

F-GERINDRA (ROBERTH ROUW) :

Pak Ketua, sebelum tutup.

Saya kira kesimpulan ini kita sudah terbawa dalam keputusan MK bahwa memberikan rincian masing-masing program, harusnya rancangan program karena kita belum setuju itu, rancangan program ya.

KETUA RAPAT :

Bolehlah boleh, memang sampai sekarang belum ada program. Apa yang kita bahas ini RAPBN ya. Judul utamanya itu RAPBN bukan APBN ya Pak Robert, jadi apa yang kita bicarakan ini ke depannya ini semuanya rancangan tetapi tidak apa-apa tambahkan saja rancangan. Jadi, Pak Sekjen kami minta sebagai apa menyampaikan kepada unit eselon 1 yang lain apa yang menjadi kesimpulan kita poin 7 itu supaya dikomunikasikan, mudah-mudahan pertemuan nanti siang nanti sudah bisa disampaikan kepada Komisi untuk menjadi bahan pertimbangan komisi.

Cukup ya?

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Saya cuma dengar-dengar Pimpinan, mungkin ke Bapak-bapak juga, katanya kalau ngotot DPR RI itu meminta rincian kasih saja dengar-dengar saja, karena ini saling ini, ini perlu ke MK lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Saya kira pertemuan kita harus posisikan dalam inisiatif atau itikad baik untuk kemajuan bangsa, hal-hal yang sifatnya praduga-praduga itu kita kesampingkanlah, ini pertemuan resmi antara lembaga negara, antara Presiden dengan DPR RI, oleh karena itu isu-isu yang tidak jelas itu tidak boleh menjadi agenda resmi kita. Jadi, yang kita acu adalah agenda resmi kenegaraan antara DPR RI dengan Pemerintah dan itu yang kita tuangkan dalam kesepakatan berupa kesimpulan resmi untuk mengikat kita semua untuk kita jalankan.

Baik, dengan mengucapkan *alhamdulillah* kesimpulan kita sahkan. Kami persilakan Pak Sekjen untuk menyampaikan *closing remarks* mewakili sekalian Pak Irjen.

SEKJEN KEMENAKER RI :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pak Ketua yang saya hormati dan saya muliakan.

Segala hormat kepada Bapak dan Ibu semua dan insyAllah kami pun tidak ada sesuatu hal yang dalam konteks apa namanya menghindari, sepanjang kita ini lintas *commisional mission* saya kira kita tidak ada masalah Pak dan kami akan siap bekerja sama dengan sungguh-sungguh karena tujuan dan target kita adalah sama, untuk rakyat jadi insyAllah kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan, mengoptimalkan sumber daya yang kita kelola ini dan insyAllah kami akan lakukan yang terbaik untuk itu.

Terima kasih banyak Pak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Sekjen, Pak Irjen, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Dengan demikian kita bisa akhiri RDP ini antara Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja bersama-sama dengan Komisi IX DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* RDP ini kita tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.35 WIB)

**Jakarta, Februari 2015
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

Ttd,

**MUHAMMAD YUS IQBAL, SE
NIP. 196707171993031006**